



LAPORAN KEUANGAN 2023

AUDITED

BA 078

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**



Audited

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telepon +6221-3850455 +6221-3853922

Faksimili +6221-3856809 +6221-3856826

Website : www.ppatk.go.id

Kata Pengantar

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai kewajiban, antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dipimpinnya.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, biaya untuk pelaksanaan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, PPATK adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan PPATK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 ini disusun dalam upaya menyajikan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023 berbasis akrual yang lebih baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami senantiasa berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Kami berharap bahwa laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada PPATK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Public Governance*).

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan ini. PPATK mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas laporan keuangan pada masa mendatang akan menjadi semakin baik.

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana

Daftar Isi

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	v
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
Laporan Realisasi Anggaran	4
Neraca	5
Laporan Operasional	6
Laporan Perubahan Ekuitas	7
Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4. Basis Akuntansi	13
A.5. Dasar Pengukuran	13
A.6. Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
B.1. Pendapatan	24
B.2. Belanja	26
B.2.1. Belanja Pegawai	28
B.2.2. Belanja Barang	31
B.2.3. Belanja Modal.....	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	36
C.1. Aset Lancar	36
C.2. Aset Tetap	40
C.3. Aset Lainnya	48
C.4. Kewajiban	50
C.5. Ekuitas	52
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	64
F. Pengungkapan Lain-Lain	66

Daftar Tabel dan Grafik

Daftar Tabel

Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	1
Tabel 2	: Ringkasan Neraca Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	2
Tabel 3	: Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022... ..	2
Tabel 4	: Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	3
Tabel 5	: Penggolongan Kualitas Piutang	18
Tabel 6	: Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	20
Tabel 7	: DIPA PPAK Tahun 2023	23
Tabel 8	: DIPA PPAK Berdasarkan Program Tahun 2023	24
Tabel 9	: Rincian Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023.....	24
Tabel 10	: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	25
Tabel 11	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	26
Tabel 12	: Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.....	28
Tabel 13	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022.....	28
Tabel 14	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022... ..	32
Tabel 15	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022.	35
Tabel 16	: Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	36
Tabel 17	: Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi <i>Software</i> per 31 Desember 2023 dan 2022.....	37
Tabel 18	: Rincian Kualitas Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022.....	39
Tabel 19	: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	39
Tabel 20	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022.....	40
Tabel 21	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022.....	40
Tabel 22	: Mutasi Tanah Per 31 Desember 2023.....	43
Tabel 23	: Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023.....	43
Tabel 24	: Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	46
Tabel 25	: Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023	47
Tabel 26	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	47
Tabel 27	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.....	48
Tabel 28	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	48
Tabel 29	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023	49
Tabel 30	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023.....	50
Tabel 31	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022.....	50
Tabel 32	: Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	52
Tabel 33	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	53

Tabel 34	:	Perbandingan Rincian Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	55
Tabel 35	:	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	56
Tabel 36	:	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	58
Tabel 37	:	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	59
Tabel 38	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	60
Tabel 39	:	Rincian Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	64
Tabel 40	:	Daftar Tuntutan Hukum.....	66
Tabel 41	:	Rincian Hibah Yang Diterima.....	67
Tabel 42	:	Rincian Output Strategis Untuk Periode 31 Desember 2023.....	68
Tabel 43	:	Rincian Output untuk periode 31 Desember 2023.....	68
Tabel 44	:	Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional untuk 31 Desember 2023.....	69
Tabel 45	:	Rincian Target dan Realisasi Pelatihan Bagi Apgakum periode 31 Desember 2023.....	70

Daftar Grafik

Grafik 1	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	28
----------	--	----

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran

1. Neraca Percobaan Tingkat Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2023	A
2. Neraca Tingkat Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2023 dan 2022	B
3. Laporan Operasional Tingkat Kementerian/Lembaga untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.....	C
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian/Lembaga untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022	D
5. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	E
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	F
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	G
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023	H
9. Daftar Rekening Pemerintah	I
10. Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, dan Setara Kas	J
11. Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	K
12. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca.....	L

Pernyataan Tanggung Jawab



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN K E P A L A

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala PPATK,



Ivan Yustiavandana

Ringkasan Laporan Keuangan

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 ini telah disusun dan dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.691.517.303. Realisasi Belanja PPATK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp295.324.440.555 atau mencapai 100,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp295.106.419.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.691.517.303	0,00	1.218.748.310
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.691.517.303	0,00	1.218.748.310
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1	146.125.064.000	146.522.906.500	100,27	133.080.013.207
Belanja Barang	B.2.2	99.290.090.000	99.117.426.538	99,83	63.756.378.703
Belanja Modal	B.2.3	49.691.265.000	49.684.107.517	99,99	16.666.457.530
JUMLAH BELANJA		295.106.419.000	295.324.440.555	100,07	213.502.849.440

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2023 dicatat dan dijelaskan sebesar Rp520.936.326.031 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp6.010.564.571, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp496.053.113.127, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp18.872.648.333.

Nilai Kewajiban PPATK seluruhnya tersaji sebesar Rp1.639.222.662 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas PPATK tersaji sebesar Rp519.297.103.369.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Neraca
per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
ASET					
Aset Lancar	C.1	6.010.564.571	7.932.350.096	(1.921.785.525)	(24,23)
Aset Tetap	C.2	496.053.113.127	476.447.587.360	19.605.525.767	4,11
Aset Lainnya	C.3	18.872.648.333	6.895.914.396	11.976.733.937	173,68
JUMLAH ASET		520.936.326.031	491.275.851.852	29.660.474.179	6,04
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	C.4	1.639.222.662	421.653.201	1.217.569.461	288,76
JUMLAH KEWAJIBAN		1.639.222.662	421.653.201	1.217.569.461	288,76
EKUITAS					
Ekuitas	C.5	519.297.103.369	490.854.198.651	28.442.904.718	5,79
JUMLAH EKUITAS		519.297.103.369	490.854.198.651	28.442.904.718	5,79
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		520.936.326.031	491.275.851.852	29.660.474.179	6,04

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp389.026.871, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp270.336.724.397, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp269.947.697.526). Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp571.850.383), sehingga Defisit-LO terjadi sebesar (Rp270.519.547.909).

Ringkasan Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	D.1	389.026.871	234.845.803	154.181.068	65,65
BEBAN	D.2 - D.8	270.336.724.397	244.282.527.635	26.054.196.762	10,67
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(269.947.697.526)	(244.047.681.832)	(25.900.015.694)	10,61
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9 - D.12				
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(571.850.383)	1.324.322.184	(1.896.172.567)	(143,18)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(270.519.547.909)	(242.723.359.648)	(27.796.188.261)	11,45
POS LUAR BIASA		-	-		
SURPLUS/DEFISIT LO		(270.519.547.909)	(242.723.359.648)	(27.796.188.261)	11,45

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp490.854.198.651 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp270.519.547.909). Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (Rp668.070.625) dan Transaksi Antar-Entitas senilai total Rp299.630.523.252, sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp519.297.103.369. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
EKUITAS AWAL	E.1	490.854.198.651	507.788.325.127	(16.934.126.476)	(3,33)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(270.519.547.909)	(242.723.359.648)	(27.796.188.261)	11,45
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(668.070.625)	(83.729.364)	(584.341.261)	697,89
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(631.842.999)	(85.760.304)	(546.082.695)	636,75
Lain-lain		(36.227.626)	2.030.940	(38.258.566)	(1.883,79)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	299.630.523.252	225.872.962.536	73.757.560.716	32,65
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		28.442.904.718	(16.934.126.476)	45.377.031.194	(267,96)
EKUITAS AKHIR	E.5	519.297.103.369	490.854.198.651	28.442.904.718	5,79

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan yang meliputi perubahan manajemen dan kegiatan yang dibiayai dari hibah.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca per 31 Desember 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh PPATK untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.691.517.303	0,00	1.218.748.310
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.691.517.303	0,00	1.218.748.310
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1	146.125.064.000	146.522.906.500	100,27	133.080.013.207
Belanja Barang	B.2.2	99.290.090.000	99.117.426.538	99,83	63.756.378.703
Belanja Modal	B.2.3	49.691.265.000	49.684.107.517	99,99	16.666.457.530
JUMLAH BELANJA		295.106.419.000	295.324.440.555	100,07	213.502.849.440

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana

Neraca

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Neraca

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
ASET					
Aset Lancar	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	C.1.3	4.494.720.138	6.493.196.989	(1.998.476.851)	(30,78)
Pendapatan yang masih harus diterima	C.1.4	11.886.118	-	11.886.118	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	28.765.713	439.903.328	(411.137.615)	(93,46)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	(28.765.713)	(403.675.702)	374.909.989	(92,87)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		-	36.227.626	(36.227.626)	(100,00)
Persediaan	C.1.7	1.503.958.315	1.402.925.481	101.032.834	7,20
Persediaan belum Diregister		-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar		6.010.564.571	7.932.350.096	(1.921.785.525)	(24,23)
Aset Tetap	C.2				
Tanah	C.2.1	235.898.373.342	235.129.908.040	768.465.302	0,33
Peralatan dan Mesin	C.2.2	231.682.791.394	189.764.324.578	41.918.466.816	22,09
Gedung dan Bangunan	C.2.3	231.903.803.902	227.693.849.784	4.209.954.118	1,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	235.602.000	235.602.000	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	720.400.368	508.155.368	212.245.000	41,77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	99.017.550	99.017.550	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(204.486.875.429)	(176.983.269.960)	(27.503.605.469)	15,54
Jumlah Aset Tetap		496.053.113.127	476.447.587.360	19.605.525.767	4,11
Aset Lainnya	C.3				
Aset Tak Berwujud	C.3.1	44.857.359.660	37.963.344.052	6.894.015.608	18,16
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	900.470.326	-	900.470.326	-
Aset Lain-lain	C.3.3	5.088.200.711	5.679.017.251	(590.816.540)	(10,40)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(31.973.382.364)	(36.746.446.907)	4.773.064.543	(12,99)
Jumlah Aset Lainnya		18.872.648.333	6.895.914.396	11.976.733.937	173,68
JUMLAH ASET		520.936.326.031	491.275.851.852	29.660.474.179	6,04
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	C.4				
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	1.630.257.245	413.331.118	1.216.926.127	294,42
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.4.3	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.4	8.965.417	8.322.083	643.334	7,73
Utang Muka dari KPPN	C.4.5	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.6	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.639.222.662	421.653.201	1.217.569.461	288,76
JUMLAH KEWAJIBAN		1.639.222.662	421.653.201	1.217.569.461	288,76
EKUITAS					
Ekuitas	C.5				
		519.297.103.369	490.854.198.651	28.442.904.718	5,79
JUMLAH EKUITAS		519.297.103.369	490.854.198.651	28.442.904.718	5,79
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		520.936.326.031	491.275.851.852	29.660.474.179	6,04

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala PPAK



Ivan Yustiavandana

Laporan Operasional

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	389.026.871	234.845.803	154.181.068	65,65
JUMLAH PENDAPATAN		389.026.871	234.845.803	154.181.068	65,65
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	146.524.787.576	133.079.269.941	13.445.517.635	10,10
Beban Persediaan	D.3	3.094.813.449	2.380.143.014	714.670.435	30,03
Beban Barang dan Jasa	D.4	35.797.317.056	40.316.651.844	(4.519.334.788)	(11,21)
Beban Pemeliharaan	D.5	23.630.029.137	23.440.250.924	189.778.213	0,81
Beban Perjalanan Dinas	D.6	22.645.414.992	12.984.131.783	9.661.283.209	74,41
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	38.644.362.187	31.678.404.427	6.965.957.760	21,99
Beban Penyusutan Piutang tak Tertagih		-	403.675.702	(403.675.702)	(100,00)
JUMLAH BEBAN		270.336.724.397	244.282.527.635	26.054.196.762	10,67
SURPLUS (DEFSIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(269.947.697.526)	(244.047.681.832)	(25.900.015.694)	10,61
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFSIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	988.496.967	846.394.370	142.102.597	16,79
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	1.874.626.873	10.234.400	1.864.392.473	18.216,92
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(886.129.906)	836.159.970	(1.722.289.876)	(205,98)
SURPLUS/(DEFSIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	318.297.041	568.909.265	(250.612.224)	(44,05)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	4.017.518	80.747.051	(76.729.533)	(95,02)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		314.279.523	488.162.214	(173.882.691)	(35,62)
SURPLUS /DEFSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(571.850.383)	1.324.322.184	(1.896.172.567)	(143,18)
SURPLUS/DEFSIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(270.519.547.909)	(242.723.359.648)	(27.796.188.261)	11,45
SURPLUS/DEFSIT LO		(270.519.547.909)	(242.723.359.648)	(27.796.188.261)	11,45

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala PPA TK,



Ivan Yustiavandana

Laporan Perubahan Ekuitas

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Rp	%
EKUITAS AWAL	E.1	490.854.198.651	507.788.325.127	(16.934.126.476)	(3,33)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(270.519.547.909)	(242.723.359.648)	(27.796.188.261)	11,45
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(668.070.625)	(83.729.364)	(584.341.261)	697,89
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(631.842.999)	(85.760.304)	(546.082.695)	636,75
Lain-lain		(36.227.626)	2.030.940	(38.258.566)	(1.883,79)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	299.630.523.252	225.872.962.536	73.757.560.716	32,65
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		28.442.904.718	(16.934.126.476)	45.377.031.194	(267,96)
EKUITAS AKHIR	E.5	519.297.103.369	490.854.198.651	28.442.904.718	5,79

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala PPA TK



Ivan Yustiavandana

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2022 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang

Pelaksanaan Sistem SAKTI.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
22. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

*Profil dan Kebijakan Teknis
PPATK*

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK dituangkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2020 s.d. 2024, sebagai berikut:

1

Visi PPATK

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2

Misi PPATK

- a. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- b. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- d. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

3

Tujuan

Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

4

Sasaran Strategis PPATK

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Sasaran Strategis PPATK selanjutnya akan dijelaskan ke dalam Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan Sasaran Kegiatan yaitu:
 - a. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - b. Meningkatnya kualitas hasil riset dan pengembangan PPATK.
2. Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya pemenuhan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - b. Meningkatnya kualitas layanan hukum PPATK.
3. Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas data pelaporan dari pihak pelapor.
- b. Meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan pihak pelapor.
4. Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas Hasil Analisis PPATK.
 - b. Meningkatnya kualitas Hasil Pemeriksaan PPATK.
 - c. Meningkatnya efektivitas diseminasi produk intelijen PPATK dan pemberian dukungan penanganan perkara.
5. Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya efektivitas kerja sama dengan instansi dalam negeri dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - b. Meningkatnya kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*.
6. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya efektivitas layanan informasi publik PPATK.
 - b. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
 - c. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK.
7. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK.
 - b. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi PPATK.
8. Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK.
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan keuangan PPATK.
 - c. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK.
 - d. Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dan ketatalaksanaan PPATK.

9. Meningkatnya peran APIP dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK dengan Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - a. Meningkatnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK.
 - b. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK.

*Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan lembaga pemerintah dengan kode Bagian Anggaran (BA) 078 dan memiliki dua Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima. Satuan Kerja di PPATK terdiri dari Satuan Kerja Kantor Pusat PPATK (Satker 453374) dan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Satker 417654).

Berdasarkan Surat Kepala PPATK Nomor T/232/KU.02/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 hal Permohonan Mengikuti Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan persetujuan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 905/KMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, PPATK mengimplementasikan aplikasi SAKTI dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sejak 1 Januari 2019.

Aplikasi SAKTI digunakan di PPATK pada Satker 417654 dan Satker 453374 untuk melakukan pencatatan secara transaksional berbasis akrual berdasarkan dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan.

Pada aplikasi SAKTI, Modul Akuntansi dan Pelaporan menggantikan Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual (SAIBA) dalam penyusunan Laporan Keuangan, Modul Aset Tetap menggantikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Modul Persediaan menggantikan aplikasi Persediaan.

Perubahan mendasar pada Aplikasi SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan, yaitu terdapat *Open-Closing Period* untuk melakukan buka-tutup periode buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Sebelum melakukan tutup buku, operator Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan validasi seluruh transaksi dan memposting jurnal yang berasal dari modul terkait lainnya (Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Komitmen, dan Modul Bendahara).

Pada *closing period* Modul Akuntansi dan Pelaporan, secara otomatis modul lainnya tutup buku pada periode yang sama. Periode Akuntansi pada aplikasi SAKTI terdiri dari 12 periode normal (Januari-Desember), periode *unaudited*, dan periode *audited*.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

PPATK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kedua basis akuntansi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar pengukuran yang diterapkan PPATK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian laporan keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang digunakan oleh PPATK. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK diuraikan, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LRA di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan-LO

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada PPATK, yaitu:
 - 1) Pendapatan Sewa Lahan, Gedung dan Bangunan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui secara proporsional oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
 - 2) Pendapatan Denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, yaitu pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - 3) Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas.

- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban-beban yang ada).
- d. Pendapatan dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LO di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- f. Pendapatan PNBP-LO diukur dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di KUN.
 - 2) Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerja sama dalam rangka perikatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

Aset

5. Aset

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh PPATK sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- c. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

1) Aset Lancar

- a) Aset Lancar diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b) Aset Lancar terdiri dari kas atau setara kas, belanja dibayar di muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, piutang, dan persediaan.
- c) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dijelaskan di neraca dengan menggunakan nilai nominal rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dijelaskan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- d) Setara Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- e) Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang akan diterima setelah tanggal pelaporan.
- f) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.



- g) Piutang dijelaskan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- h) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- i) Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menetapkan bahwa mulai tahun 2021 seluruh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk menerapkan metode pencatatan *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO). Berdasarkan metode ini, barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

2) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

- a) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu, tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.
- b) Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, sehingga jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.
- c) Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, tetapi pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.
- d) Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka disajikan pada pos Aset Lancar di Neraca.

*Beban Dibayar di
Muka/Uang Muka Belanja*

3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- c) Penggolongan Kualitas Piutang dijelaskan dalam Tabel 5.

Tabel 5
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.		0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	

Aset Tetap

4) Aset Tetap

- a) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- b) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - i. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - ii. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - iii. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- d) Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan, antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- e) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

5) Penyusutan Aset Tetap

- a) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- b) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - i. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan.
 - ii. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
 - iii. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah.
 - iv. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat.
- c) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat dijelaskan dalam Tabel 6.

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

6) **Piutang Jangka Panjang**

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- b) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- d) TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

7) **Aset Lainnya**

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud dijelaskan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 81/KM.6/2018.
- d) Aset Tak Berwujud pada PPATK berupa *software* dan memiliki masa manfaat terbatas hingga empat tahun.
- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Tuntutan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum kepada pemerintah, maka perlakuan akuntansi atas tuntutan hukum kepada pemerintah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagai berikut:

1. Pencatatan Kewajiban

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA kementerian negara/lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, tetapi belum dianggarkan DIPA kementerian negara/lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum); dan
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK LKKL.

2. Pencatatan Aset Tetap

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - i. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - ii. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat jika SK penghapusan belum terbit.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak

- dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, tetapi belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat; dan
- c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Induk Nomor SP DIPA-078.01-0/2023 tanggal 30 November 2022, pagu anggaran PPATK pada awal tahun anggaran 2023 sebesar Rp292.016.662.000.

Selain itu, telah dilaksanakan automatic adjustment belanja kementerian/lembaga TA 2022 atas dasar Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023. Menindaklanjuti surat tersebut, PPATK telah melakukan penghematan belanja yang bersumber dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp13.250.944.000 dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp9.963.087.000.

Rincian pagu anggaran PPATK pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. DIPA Satker 453374 Nomor SP DIPA-078.01.1.453374/2023 pada 30 November 2022 sebesar Rp259.355.152.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah dilakukan Sembilan belas kali revisi POK dan tiga belas kali revisi DIPA sehingga total anggaran menjadi Rp266.059.082.000.
2. DIPA Satker 417654 Nomor SP DIPA-078.01.1.417654/2023 pada 30 November 2022 sebesar Rp32.661.510.000 dan sampai dengan 31 Desember 2023 sebelas kali revisi DIPA sehingga total anggaran menjadi Rp29.047.337.000. DIPA PPATK Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 7.

Tabel 7
DIPA PPATK Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Awal	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan			
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja			
1	Belanja Pegawai	135.004.704.000	146.125.064.000
2	Belanja Barang	104.381.414.000	99.290.090.000
3	Belanja Modal	52.630.544.000	49.691.265.000
	Jumlah Belanja	292.016.662.000	295.106.419.000

DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 8.

Tabel 8
DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Anggaran Setelah Revisi
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	98.809.346.000	93.258.804.000
WA	Program Dukungan Manajemen	193.207.316.000	201.847.615.000
	Jumlah Belanja	292.016.662.000	295.106.419.000

Realisasi Pendapatan
Rp1.691.517.303

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.691.517.303 dan Rp1.218.748.310. Keseluruhan Pendapatan PPATK merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 9.

Tabel 9
Rincian Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023		
		Estimasi	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1.691.517.303	100,00%
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	930.098.969	-
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	58.397.998	-
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	21.517.000	-
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	-	72.000.000	-
	e. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	288.800.000	-
	f. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	5.360.020	-
	g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	6.479.455	-
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	266.048.456	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	42.815.405	-
	Jumlah	-	1.691.517.303	100,00%

PNBP PPATK Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.691.517.303, terdiri dari:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp930.098.969 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp58.397.998 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
3. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp21.517.000 atas sewa mesin ATM BRI untuk masa sewa 1 Juni 2023 s.d. 31 Mei 2024 (satu tahun) di satker 453374.

B.1. Pendapatan (lanjutan)

4. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp72.000.000 berupa pendapatan dari penggunaan asrama di satker 417654.
5. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp288.800.000 merupakan pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pendidikan terkait TPPU dan TPPT di satker 417654.
6. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp5.360.020 di satker 453374.
7. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp6.479.455 yang berasal dari satker 453374.
8. Penerimaan Kembali Belanja pegawai TAYL sebesar Rp266.048.456 merupakan pengembalian belanja atas temuan BPK yang menjadi Piutang di Laporan Keuangan tahun 2022.
9. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp42.815.405 merupakan pengembalian belanja atas temuan BPK yang menjadi Piutang di Laporan Keuangan tahun 2022.

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 10.

Tabel 10
Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.691.517.303	1.218.748.310	472.768.993	38,79
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	930.098.969	0,00	930.098.969	0,00
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	58.397.998	846.394.370	(787.996.372)	(93,10)
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	21.517.000	19.973.000	1.544.000	7,73
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	72.000.000	0,00	72.000.000	0,00
	e. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	288.800.000	160.760.000	128.040.000	79,65
	f. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	5.360.020	5.911.763	(551.743)	(9,33)
	g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6.479.455	54.259.053	(47.779.598)	(88,06)
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	266.048.456	25.590.290	240.458.166	939,65
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	42.815.405	105.859.834	(63.044.429)	(59,55)
	Jumlah	1.691.517.303	1.218.748.310	472.768.993	38,79

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar (38,79%) dibandingkan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 yang disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

B.1. Pendapatan (lanjutan)

1. Peningkatan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp930.098.969 atau 0,00% karena akun ini pertama kali digunakan di tahun 2023.
2. Penurunan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp787.996.372 atau (93,10%) karena untuk pendapatan penjualan BMN dipindahkan ke akun Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.
3. Peningkatan Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp1.544.000 atau 7,73% karena naiknya tarif sewa dari DJKN.
4. Peningkatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp72.000.000 atau 0,00% karena akun ini pertama kali digunakan di tahun 2023.
5. Peningkatan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebesar Rp128.040.000 atau 79,65% karena bertambahnya peserta diklat dibandingkan dengan tahun lalu.
6. Penurunan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp551.743 atau (9,33%).
7. Penurunan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp47.779.598 atau (88,06%) karena berkurangnya keterlambatan pemenuhan pengadaan barang dan jasa.
8. Peningkatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp240.458.166 atau 939,65% sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022.
9. Penurunan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp63.044.429 atau (59,55%) karena berkurangnya temuan terkait belanja barang di pemeriksaan BPK Tahun 2022.

Realisasi Belanja (Neto)
Rp295.324.440.555

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp295.324.440.555 dan Rp213.502.849.440. Realisasi belanja di PPATK terdiri dari realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 menurut jenis belanja dijelaskan dalam Tabel 11.

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi (Neto)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	146.125.064.000	146.522.906.500	100,27
Belanja Barang	99.290.090.000	99.117.426.538	99,83
Belanja Modal	49.691.265.000	49.684.107.517	99,99
Jumlah	295.106.419.000	295.324.440.555	100,07

B.2. Belanja (lanjutan)

Belanja Pegawai mengalami pagu minus dimana realisasi lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan.

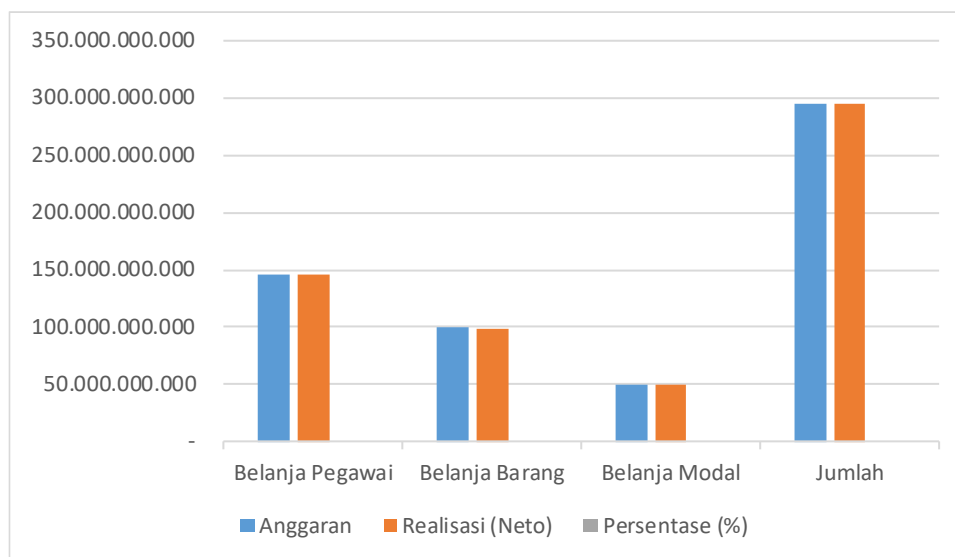
Pada tanggal 19 Oktober 2023 melalui surat nomor S-377/MK.2/2023 dari Direktorat Jenderal Anggaran permintaan penambahan pagu belanja pegawai telah disetujui namun dari total permintaan penambahan sebesar 13 miliar hanya disetujui sebesar 10 milyar sehingga ada gap anggaran sebesar 3 milyar yang wajib dipenuhi dari anggaran yang ada.

Pada tanggal 8 November tahun 2023 PPATK telah mengirimkan surat terkait permohonan penambahan pagu untuk belanja pegawai dengan surat nomor 895 ke DJA untuk kembali meminta penambahan pagu belanja pegawai dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai di PPATK namun permintaan tersebut ditolak.

Posisi DIPA di tanggal 30 Desember 2023 sudah minus sehingga PPATK bersurat kembali ke DJA untuk penambahan pagu melalui surat nomor 6 tanggal 11 Januari 2024 namun permintaan tersebut Kembali ditolak.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik yang disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)



Realisasi Belanja 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 38,32% jika dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2022 yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Perbandingan

B.2. Belanja (lanjutan)

Realisasi Belanja Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 12.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja (Neto)
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023 (Neto)	Realisasi 31 Desember 2022 (Neto)	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pegawai	146.522.906.500	133.080.013.207	13.442.893.293	10,10
Barang	99.117.426.538	63.756.378.703	35.361.047.835	55,46
Modal	49.684.107.517	16.666.457.530	33.017.649.987	198,11
Jumlah	295.324.440.555	213.502.849.440	81.821.591.115	38,32

Realisasi Belanja Pegawai
(Neto) Rp146.522.906.500

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp146.522.906.500 dan Rp133.080.013.207. Realisasi Belanja Pegawai di PPAK pada tahun 2023 digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai di Satker 453374 dan Satker 417654. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Bruto				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	16.434.017.045	15.467.550.480	966.466.565	6,25
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	245.090	248.156	(3.066)	(1,24)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.002.186.330	937.561.070	64.625.260	6,89
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	272.271.814	255.381.366	16.890.448	6,61
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	942.990.000	910.770.000	32.220.000	3,54
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.663.758.000	2.384.277.000	279.481.000	11,72
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	94.721.425	75.957.659	18.763.766	24,70
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	898.080.420	854.845.680	43.234.740	5,06
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.639.880.000	2.876.827.000	(236.947.000)	(8,24)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	270.945.000	365.730.000	(94.785.000)	(25,92)
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1.200.268.000	1.200.268.000	-	-
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	283.380.400	283.380.400	-	-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	869.161.800	-	869.161.800	0,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.536	-	14.536	0,00
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	59.532.680	-	59.532.680	0,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	14.655.614	-	14.655.614	0,00
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	136.805.000	-	136.805.000	0,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	55.111.620	-	55.111.620	0,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	198.360.000	-	198.360.000	0,00
512111	Belanja Uang Honor Tetap	6.125.580.322	7.210.515.597	(1.084.935.275)	(15,05)
512211	Belanja Uang Lembur	488.880.000	402.884.000	85.996.000	21,35
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	14.002.000	-	14.002.000	0,00
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	107.950.626.590	100.013.389.572	7.937.237.018	7,94
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3.922.528.643	-	3.922.528.643	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	146.538.002.329	133.239.585.980	13.298.416.349	9,98
	Pengembalian Belanja Pegawai	15.095.829	159.572.773	(144.476.944)	(90,54)
	Total Belanja Pegawai	146.522.906.500	133.080.013.207	13.442.893.293	10,10

Terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar 10,10%. Kenaikan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

1. Belanja Gaji Pokok PNS naik sebesar Rp966.466.565 atau sebesar 6,25% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.
2. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS naik sebesar Rp64.625.260 atau sebesar 6,89%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai yang menikah.
3. Belanja Tunjangan Anak PNS naik sebesar Rp16.890.448 atau sebesar 6,61% antara lain karena penambahan jumlah tanggungan PNS.
4. Belanja Tunj. Struktural PNS naik sebesar Rp32.220.000 atau sebesar 3,54% antara lain karena sudah terisinya sebagian posisi Eselon I.
5. Belanja Tunjangan Fungsional PNS naik sebesar Rp279.481.000 atau sebesar 11,72% karena penambahan jumlah pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu, antara lain Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Anggaran, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Analis Transaksi Keuangan, dan Widyaiswara.
6. Belanja Tunjangan PPh PNS naik sebesar Rp18.763.766 atau sebesar 24,70%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
7. Belanja Tunjangan Beras PNS naik sebesar Rp43.234.740 atau sebesar 5,06% antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
8. Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp869.161.800 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
9. Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp14.536 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
10. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK sebesar Rp59.532.680 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
11. Belanja Tunjangan Anak PPPK sebesar Rp14.655.614 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
12. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp136.805.000 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
13. Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp55.111.620 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.

B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

14. Belanja Uang Makan PPPK sebesar Rp198.360.000 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
15. Belanja Uang Lembur naik sebesar Rp85.996.000 atau sebesar 21,35% karena peningkatan frekuensi kegiatan lembur.
16. Belanja Uang Lembur PPPK sebesar Rp14.002.000 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
17. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) naik sebesar Rp7.937.237.018 atau sebesar 7,94% karena kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan jumlah CPNS, dan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 beserta 50% Tunjangan Khusus/Kegiatan.
18. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp3.922.528.643 atau sebesar 0% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.

Penurunan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, terdiri dari:

1. Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp3.066 atau sebesar 1,24%
2. Belanja Tunjangan Uang Makan PNS sebesar Rp236.947.000 atau sebesar 8,24% karena bertambahnya pegawai yang menjalani perjalanan dinas sehingga uang makan tidak dibayarkan.
3. Belanja Tunjangan Umum PNS turun sebesar Rp94.785.000 atau sebesar 25,92% karena pengurangan jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum.
4. Belanja Uang Honor Tetap turun sebesar Rp1.084.935.275 atau sebesar 15,05% karena Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diangkat menjadi PPPK.

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp15.095.829 yang terdiri dari:

- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp1.991.
- b. Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp3.780.000.
- c. Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp8.870.000.
- d. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp2.443.838.

Realisasi Belanja Barang (Neto)
Rp99.117.426.538

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp99.117.426.538 dan Rp63.756.378.703. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021 dijelaskan dalam Tabel 14.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9.348.531.313	8.200.782.330	1.147.748.983	14,00
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	182.789.706	293.286.239	(110.496.533)	(37,68)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	42.720.000	22.677.000	20.043.000	88,38
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	521.012.919	417.721.000	103.291.919	24,73
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.163.496.403	(1.163.496.403)	(100,00)
521211	Belanja Bahan	3.145.891.943	2.338.935.535	806.956.408	34,50
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.178.000.000	264.000.000	914.000.000	346,21
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.418.754.919	1.757.696.894	1.661.058.025	94,50
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.666.000	(2.666.000)	(100,00)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.992.716.238	1.922.222.384	1.070.493.854	55,69
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	487.537.631	179.279.203	308.258.428	171,94
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	-	56.839.500	(56.839.500)	(100,00)
522111	Belanja Langganan Listrik	4.987.068.954	4.123.379.260	863.689.694	20,95
522112	Belanja Langganan Telepon	158.270.062	153.349.412	4.920.650	3,21
522113	Belanja Langganan Air	1.678.200	1.544.435	133.765	8,66
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.387.290.816	1.922.412.084	464.878.732	24,18
522131	Belanja Jasa Konsultan	2.843.359.915	2.453.649.028	389.710.887	15,88
522141	Belanja Sewa	3.221.128.023	2.365.505.276	855.622.747	36,17
522151	Belanja Jasa Profesi	1.683.795.340	1.410.209.000	273.586.340	19,40
522191	Belanja Jasa Lainnya	2.193.741.268	1.352.220.216	841.521.052	62,23
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	527.203.828	(527.203.828)	(100,00)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.015.272.191	2.814.047.867	(798.775.676)	(28,39)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	82.579.310	(82.579.310)	(100,00)
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	437.373.311	441.848.124	(4.474.813)	(1,01)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.408.251.539	11.910.466.862	18.497.784.677	155,31
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	100.064.450	(100.064.450)	(100,00)
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4.837.221.160	4.494.411.180	342.809.980	7,63
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	9.812.917.134	5.148.710.475	4.664.206.659	90,59
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	502.670.000	389.286.333	113.383.667	29,13
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.357.604.285	3.543.794.370	(1.186.190.085)	(33,47)
524115	Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.137.429.838	2.609.663.785	2.527.766.053	96,86
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	81.184.473	-	81.184.473	-
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.788.389.695	1.397.304.638	3.391.085.057	242,69
	Jumlah Belanja Barang Bruto	99.172.600.873	63.861.252.421	35.311.348.452	55,29
	Pengembalian Belanja	55.174.335	104.873.718	(49.699.383)	(47,39)
	Total Belanja Barang	99.117.426.538	63.756.378.703	35.361.047.835	55,46

Kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu adalah sebesar 55,46%.

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

Kenaikan realisasi Belanja Barang dan Jasa, sebagai berikut:

1. Belanja Keperluan Perkantoran naik sebesar Rp1.147.748.983 atau 14,00% antara lain pengadaan pakaian dinas (KORPRI PNS), Penghasilan PPNPN (Tenaga Pengamanan, Pengemudi, dan Pramubakti), air minum pegawai, pengisian etoll, kopi, susu, gula, teh, permen, jas hujan, microphone, box container, biaya materai KKP, pembelian jamuan tamu/pimpinan/Eselon I, linen kantor (taplak meja makan), pemenuhan asrama (alas duduk, kain sofa asrama, antena TV, remote TV, dan sandal asrama), dan laundry perlengkapan asrama.
2. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja naik sebesar Rp20.043.000 atau 88,38% disebabkan pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran.
3. Belanja Barang Operasional Lainnya naik sebesar Rp103.291.919 atau 24,73% karena karena pengadaan MCU dan swab serta pengadaan alat test narkoba.
4. Belanja Bahan naik sebesar Rp806.956.408 atau 34,50% antara lain disebabkan peningkatan kegiatan rapat, kegiatan lainnya secara luring, pembayaran pembelian konsumsi, pembuatan plakat, dan pembelian bendera Komite TPPU.
5. Belanja Honor Output Kegiatan naik sebesar Rp914.000.000 atau 346,21% antara lain disebabkan pembayaran honorarium atas kegiatan Komite TPPU.
6. Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.661.058.025 atau 94,50% dikarenakan peningkatan pelatihan pegawai PPATK, pembayaran laundry pakaian peserta pelatihan, pengadaan bendera Merah Putih, dan pengadaan umbul-umbul ASEAN dan HUT PPATK.
7. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi naik sebesar Rp1.070.493.854 atau 55,69% disebabkan pengadaan barang souvenir karena peningkatan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, pembayaran diklat kit, perlengkapan pelatihan, souvenir ATK, Toner Printer, kalender, plakat, alat rumah tangga dan bahan kebersihan, amenitis asrama, materai, dan seminar kit.
8. Belanja Barang Persediaan Lainnya sebesar Rp308.258.428 atau 171,94% disebabkan oleh pembelian alat, bahan, dan obat-obatan klinik PPATK
9. Belanja Langganan Listrik naik sebesar Rp863.689.694 atau 20,95% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.
10. Belanja Langganan Telepon naik sebesar Rp4.920.650 atau 3,21% disebabkan peningkatan penggunaan telepon kantor untuk mendukung operasional perkantoran.
11. Belanja Langganan Air naik sebesar Rp133.765 atau 8,66% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

12. Belanja Langganan daya dan Jasa Lainnya naik sebesar Rp464.878.732 atau 24,18% disebabkan pembayaran Langganan Lisensi Software Manajemen Perkantoran (cloud storage google drive, template lisensi unit kegiatan pelatihan, aplikasi absensi pegawai Gedung Arsip Ciloto, langganan akun aplikasi Canva, langganan aplikasi Articulate 360, langganan internet Pusdiklat APU PPT dan Gedung Arsip Ciloto, Lisensi Aplikasi Video Conference dan layanan internet gedung Wisma Mandiri.
 13. Belanja Jasa Konsultan naik sebesar Rp389.710.887 atau 15,88% karena adanya kegiatan penyusunan dokumen FIR dan penyusunan arsitektur SPBE.
 14. Belanja Sewa naik sebesar Rp855.622.747 atau 36,17% antara lain disebabkan bertambahnya sewa kendaraan dinas Eselon II di PPATK.
 15. Belanja Jasa Profesi naik sebesar Rp273.586.340 atau 19,40% antara lain disebabkan meningkatnya kegiatan yang menggunakan narasumber eksternal.
 16. Belanja Jasa Lainnya naik sebesar Rp841.521.052 atau 62,23% disebabkan tes psikologi seleksi PPPK dan peningkatan penggunaan jasa penerjemah untuk keperluan MER FATF.
 17. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp18.497.784.677 atau 155,31% karena perpanjangan dan pembelian lisensi yang meningkat di tahun 2023.
 18. Belanja Pemeliharaan Lainnya naik sebesar Rp342.809.980 atau 7,63% disebabkan kurs yang meningkat saat pembayaran Annual Fee GoAML.
 19. Belanja Perjalanan Dinas Biasa naik sebesar Rp4.664.206.659 atau 90,59% karena meningkatnya kegiatan perjalanan dinas dan audit.
 20. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota naik sebesar Rp113.383.667 atau 29,13% karena meningkatnya kegiatan perjalanan dinas dan audit.
 21. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota naik sebesar Rp2.527.766.053 atau 96,86% karena meningkatnya kegiatan koordinasi, sosialisasi dan raker internal PPATK.
 22. Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri naik sebesar Rp81.184.473 atau 0% karena meningkatnya kegiatan koordinasi dan event di luar negeri.
 23. Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri naik sebesar Rp3.391.085.057 atau 242,69% karena meningkatnya kegiatan koordinasi dan event di luar negeri.
- Penurunan realisasi Belanja Barang disebabkan hal-hal, sebagai berikut:
1. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat turun sebesar Rp110.496.533 atau 37,68% disebabkan pengiriman undangan dan surat dilakukan secara daring.
 2. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 turun sebesar Rp1.163.496.403 atau 100,00% karena akun tersebut tidak lagi digunakan.

B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)

3. Belanja Barang Non-Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 turun sebesar Rp2.666.000 atau 100,00% karena akun tersebut tidak lagi digunakan.
4. Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19 turun sebesar Rp56.839.500 atau 100,00% karena akun tersebut tidak lagi digunakan.
5. Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 turun sebesar Rp527.203.828 atau 100,00% karena akun tersebut tidak lagi digunakan.
6. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp798.775.676 atau 28,39% karena terdapat pengadaan tahun 2022 dengan nominal yang material sehingga terjadi penurunan.
7. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp82.579.310 atau 100,00% karena tidak ada kegiatan pemeliharaan Gedung di tahun 2023.
8. Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.474.813 atau 1,01% karena berkurangnya premi asuransi yang diperlukan.
9. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin turun sebesar Rp100.064.450 atau 100,00% karena tidak ada kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin di tahun 2023.
10. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota turun sebesar Rp1.186.190.085 atau 33,47% karena kegiatan koordinasi dan sosialisasi dilaksanakan di luar kota.

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Barang senilai Rp55.174.335, terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp2.416.500.
2. Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp57.700.
3. Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp48.270
4. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp22.810.000.
5. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.423.800.
6. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa Rp21.260.893.
7. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp150.000.
8. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sebesar Rp300.000.
9. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp3.706.992.
10. Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri sebesar Rp180

Realisasi Belanja Modal (Neto)
Rp49.684.107.517

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp49.684.107.517 dan Rp16.666.457.530.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Belanja Bruto				
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-	-
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.373.735.157	13.513.043.292	32.860.691.865	243,18
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	-	23.650.000	(23.650.000)	(100,00)
532121	Belanja Modal Penambah Nilai Peralatan dan Mesin	120.000.000	95.213.004	24.786.996	26,03
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.372.995.000	-	1.372.995.000	0,00
533121	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	66.993.520	1.194.352.659	(1.127.359.139)	(94,39)
536111	Belanja Modal Lainnya	1.750.383.840	1.840.198.575	(89.814.735)	(4,88)
	Jumlah Belanja Bruto	49.684.107.517	16.666.457.530	33.017.649.987	198,11
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
	Total Belanja Modal	49.684.107.517	16.666.457.530	33.017.649.987	198,11

Terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 198,11%.

Kenaikan realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp32.860.691.865 atau 243,18% yang disebabkan pembelian peralatan dan mesin untuk mendukung operasional di satker 453374 dan 417654.
2. Belanja Modal Penambah Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.786.996 atau 26,03% karena adanya perbaikan dan penambahan fungsi peralatan dan mesin untuk operasional kantor.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.372.995.000 atau 0% karena adanya pembelian rumah di satker 417654.

Penurunan Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp23.650.000 atau 100,00% tidak ada lagi penggunaan akun tersebut.
2. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.127.359.139 atau 94,39% karena berkurangnya kegiatan renovasi gedung di satker 453374 dan 417654.
3. Belanja Modal Lainnya Sebesar Rp89.814.735 atau 4,88% yang disebabkan berkurangnya pengadaan lisensi.

2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET**

Aset Lancar Rp6.010.564.571

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.010.564.571 dan Rp7.932.350.096.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2023 mengalami penurunan 24,23% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya pos Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) yang merupakan perpanjangan lisensi. Rincian Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	-
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	4.494.720.138	6.493.196.989	(1.998.476.851)	(30,78)
4	Pendapatan yang masih harus diterima	11.886.118	-	11.886.118	0,00
5	Piutang Bukan Pajak	28.765.713	439.903.328	(411.137.615)	(93,46)
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(28.765.713)	(403.675.702)	374.909.989	(92,87)
7	Piutang Bukan Pajak (<i>netto</i>)	-	36.227.626	(36.227.626)	(100,00)
8	Persediaan	1.503.958.315	1.402.925.481	101.032.834	7,20
9	Persediaan belum Diregister	-	-	-	-
	Jumlah	6.010.564.571	7.932.350.096	(1.921.785.525)	(24,23)

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp0**C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di dalam tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP dan LS ke Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan dan disetorkan kembali ke Kas Negara.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp0**C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas atau aset yang disetarakan dengan kas yang masih akan disetorkan ke kas negara ataupun akan dibayarkan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp4.494.720.138

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.494.720.138 dan Rp6.493.196.989. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh, tetapi barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software* pada Satker Pusat 453374 per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 17.

Tabel 17
Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi *Software*
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No	Uraian Perpanjangan Lisensi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Access Switch	116.402.000	-	116.402.000	-
2	Acunetix Standard	80.744.571	43.254.629	37.479.942	86,63
3	AD 360 Manage Engine	154.409.189	166.924.415	(12.515.226)	(7,50)
4	Adobe Creative Cloud	99.567.312	105.509.149	(5.941.837)	(5,63)
5	AdSelf Service	18.287.705	-	18.287.705	-
6	Annual fee GoAML	806.172.360	2.406.122.484	(1.599.950.124)	(66,49)
7	Application Manager	119.784.467	96.482.800	23.301.667	24,15
8	Asset Explorer	53.542.336	43.916.946	9.625.390	21,92
9	Audit Command Language (ACL)	17.522.217	-	17.522.217	-
10	Burp Suite Professional	-	4.067.109	(4.067.109)	(100,00)
11	Cisco	-	447.787.059	(447.787.059)	(100,00)
12	Coreldraw	10.991.700	16.217.556	(5.225.856)	(32,22)
13	ESTIM	41.822.131	41.709.165	112.966	0,27
14	License Air Management Survey Pro	-	12.254.400	(12.254.400)	(100,00)
15	License Simplifiber Pro (FO Tester)	-	22.230.411	(22.230.411)	(100,00)
16	Lisensi PHPRunner	7.082.712	14.832.035	(7.749.323)	(52,25)
17	Lisensi Support Suse Linux	346.575.220	50.782.500	295.792.720	582,47
18	ManageEngine Endpoint Central Enterprise Edition	128.575.000	-	128.575.000	-
19	Mcafee	-	301.799.547	(301.799.547)	-
20	Mdaemon	263.891.583	221.386.459	42.505.124	19,20
21	Microsoft Office 365	415.296.921	378.841.784	36.455.137	9,62
22	Mobile Device Management	45.970.984	45.935.753	35.231	0,08
23	Mvision MV2 Protect Plus	185.842.399	-	185.842.399	-
24	Nas	-	512.307.692	(512.307.692)	-
25	OP Manager	39.357.923	29.152.353	10.205.570	-
26	Oracle	73.080.929	326.201.281	(253.120.352)	(77,60)
27	Perpanjangan Lisensi Support Data Domain	312.576.000	222.235.169	90.340.831	40,65
28	Router	20.174.136	-	20.174.136	-
29	Server Dell	-	474.004.321	(474.004.321)	(100,00)
30	Sewa Farm Switch	23.214.074	-	23.214.074	-
31	Sewa Whatsapp Business Official	76.629.730	-	76.629.730	-
32	Site Recovery Manager	12.798.361	-	12.798.361	-
33	SSL certificate	197.202.806	142.655.871	54.546.935	38,24
34	Support TEamMate+	22.805.951	22.352.055	453.896	2,03
35	Tableau	159.837.574	158.495.192	1.342.382	0,85
36	Trellix	398.590.565	-	398.590.565	-
37	Vcenter	31.867.918	-	31.867.918	-
38	Veritas Netbackup	85.159.200	22.977.000	62.182.200	270,63
39	Vmware	-	118.714.500	(118.714.500)	(100,00)
40	VPN	-	6.092.802	(6.092.802)	(100,00)
41	VSphere 7 Enterprise Plus	124.975.057	-	124.975.057	-
42	Zoom	-	35.985.352	(35.985.352)	(100,00)
Jumlah		4.490.751.031	6.491.237.789	(2.000.486.758)	(30,82)

Sedangkan di Satker 417654 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) adalah sebesar Rp3.969.107 yang merupakan aplikasi manajemen perkantoran seperti aplikasi kerjoo untuk absensi, Heyzine, Filmora, WPS pro, video conference dan google play.

Pendapatan yang Masih Harus
Diterima Rp11.886.118

C.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.886.118 dan Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan akrual pendapatan yang telah diterima atau akan diterima setelah tanggal laporan.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp11.886.118 terdiri dari:

1. Denda keterlambatan selama lima hari atas pengadaan souvenir plakat sesuai SPK-009/PL.02/PDM/V/2023 tanggal 27 April 2023 sebesar Rp193.972.500 (termasuk PPN) telah disetorkan ke kas negara sesuai nomor NTPN A64CC7QLUP0GP8P7 tanggal 19 April 2024 sebesar Rp873.750.
2. Kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian kualifikasi pada personil pengganti pada pengadaan jasa konsultan penyusunan dokumen *Financial Integrity Rating* (FIR) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kontrak nomor PERJ-001/PL.02/DPN/2023 tanggal 6 Juni 2023 senilai Rp1.873.254.665 (termasuk PPN). Telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 26C346U8EUE4D0E1 tanggal 22 April 2024 sebesar Rp2.400.000.
3. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya – Luar Negeri (SPM 1604) dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN A1E172G4VPI9JE7K tanggal 23 April 2024 sebesar Rp8.612.368.

Piutang Bukan Pajak
Rp28.765.713

C.1.5 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp28.765.713 dan Rp439.903.328.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Nilai Piutang bukan Pajak turun sebesar Rp411.137.615 atau 93,46% dikarenakan pelunasan piutang.

Piutang Bukan Pajak di PPATK yang memiliki kualitas **Macet** sebesar Rp28.765.713 yang berasal dari pengembalian belanja barang dan modal di satker 417654 berasal dari CV KAK, telah dilakukan upaya penagihan sebanyak 3 (tiga) kali melalui:

- i. Surat Penagihan Pertama Nomor T/033/PL.02/VIII/2022 tanggal 29 Agustus Tahun 2022.
- ii. Surat Penagihan Pertama Nomor T/036/PL.02/IX/2022 tanggal 9 September Tahun 2022.
- iii. Surat Penagihan Pertama Nomor T/043/PL.02/X/2022 tanggal 7 Oktober Tahun 2022.

C.1.5 Piutang Bukan Pajak (lanjutan)

Namun belum dibayarkan sehingga kualitas piutangnya diturunkan menjadi *macet* dan dilakukan pelimpahan ke PUPN dengan surat nomor T/531/PL.02/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan telah diterima dan disetujui oleh PUPN dengan surat Nomor SP3N-19/PUPNC.13.03/2022 tanggal 21 Desember 2022.

Rincian kualitas Piutang Bukan Pajak pada PPATK per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Kualitas Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No	Kualitas Piutang	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Lancar	-	36.409.675	(36.409.675)	(100,00)
2	Kurang Lancar	-	-	-	-
3	Diragukan	-	-	-	-
4	Macet	28.765.713	403.493.653	(374.727.940)	(92,87)
Jumlah		28.765.713	439.903.328	(411.137.615)	(93,46)

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Rp28.765.713

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp28.765.713 dan Rp403.675.702. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Rincian kualitas Piutang Bukan Pajak pada PPATK per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No	Kualitas Piutang	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Lancar	-	182.049	(182.049)	(100,00)
2	Kurang Lancar	-	-	-	-
3	Diragukan	-	-	-	-
4	Macet	28.765.713	403.493.653	(374.727.940)	(92,87)
Jumlah		28.765.713	403.675.702	(374.909.989)	(92,87)

Persediaan Rp1.503.958.315

C.1.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.503.958.315 dan Rp1.402.925.481.

C.1.7 Persediaan (lanjutan)

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Seluruh persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Konsumsi	1.120.416.879	1.043.422.312	76.994.567	7,38
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	82.445.284	182.708.313	(100.263.029)	(54,88)
3	Bahan Baku	6.485.460	12.139.444	(5.653.984)	(46,58)
4	Suku Cadang	118.281.613	109.871.101	8.410.512	7,65
5	Persediaan Lainnya	176.329.079	54.784.311	121.544.768	221,86
Jumlah		1.503.958.315	1.402.925.481	101.032.834	7,20

Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,20% jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2022 karena pembelian lebih besar dari pemakaian.

Nilai Persediaan tersebut belum termasuk souvenir plakat senilai Rp118.437.555 yang telah dikeluarkan, namun masih tersisa di unit kerja Pusdamitra. Atas hal tersebut akan disesuaikan di periode semester I Tahun 2024.

Aset Tetap
Rp496.053.113.127

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp496.053.113.127 dan Rp476.447.587.360 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,11% jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022. Rincian Aset Tetap PPAK per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	235.898.373.342	235.129.908.040	768.465.302	0,33
2	Peralatan dan Mesin	231.682.791.394	189.764.324.578	41.918.466.816	22,09
3	Gedung dan Bangunan	231.903.803.902	227.693.849.784	4.209.954.118	1,85
4	Jalan irigasi dan Jaringan	235.602.000	235.602.000	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	720.400.368	508.155.368	212.245.000	41,77
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.017.550	99.017.550	-	-
Jumlah		700.539.988.556	653.430.857.320	47.109.131.236	7,21
Akumulasi Penyusutan		(204.486.875.429)	(176.983.269.960)	(27.503.605.469)	15,54
Nilai Buku Aset Tetap		496.053.113.127	476.447.587.360	19.605.525.767	4,11

C.2 Aset Tetap (lanjutan)

Kenaikan Aset Tetap sebesar 4,11% terdiri dari:

1. Tanah sebesar Rp768.465.302 atau 0,33% karena ada pembelian rumah di satker 417654.
2. Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp41.918.466.816 atau 22,09% karena pembelian server dan penambahan lisensi.
3. Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.209.954.118 atau 1,85% karena ada pembelian rumah dan juga hibah diterima.
4. Aset Tetap Lainnya naik sebesar Rp212.245.000 atau 41,77% dikarenakan hibah masuk.

Tanah Rp235.129.908.040

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu sebesar Rp235.898.373.342 dan Rp235.129.908.040.

Aset PPATK berupa tanah, terdiri dari:

1. Tanah seluas 4.500 m² berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp194.364.000.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada tahun 2007.
2. Tanah seluas 5.648 m² berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat senilai Rp8.256.529.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada tahun 2010.
3. Tanah seluas 9.510 m² berlokasi di Jl. Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat senilai Rp28.784.107.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaeun.
4. Tanah seluas 120 m² berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp332.436.600. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014.

C.2.1 Tanah (lanjutan)

5. Tanah seluas 120 m² berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp394.585.440. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014.
6. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp528.900.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-053A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019.
7. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp490.200.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-061A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019.
8. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp610.600.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-062A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019.
9. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp770.350.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-056.12/PL.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
10. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp597.850.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan No. BAST-057.12/PL.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
11. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat senilai Rp768.465.302. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. sertifikat masih dalam proses balik nama dan penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Depok.

C.2.1 Tanah (lanjutan)

12. Pengembangan nilai aset berupa pengurusan surat pelepasan hak tujuh unit rumah dengan nomor berkas permohonan 123587/2021, 123792/2021, 123802/2021, 123838/2021, 123594/2021, 123833/2021, dan 120981/2021 senilai total Rp350.000.

Mutasi Tanah per 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 22.

Tabel 22
Mutasi Tanah
Per 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	235.129.908.040
Tanah (Lokasi Jakarta Pusat)	194.364.000.000
Tanah (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	8.256.529.000
Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat)	32.509.379.040
Mutasi tambah tahun 2023:	
Pembelian Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat)	768.465.302
Total Mutasi Tambah	768.465.302
Mutasi kurang tahun 2023:	
	0
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	768.465.302
Saldo per 31 Desember 2023	235.898.373.342
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	235.898.373.342

Peralatan dan Mesin
Rp231.682.791.394

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp1.000.000/unit. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp231.682.791.394 dan Rp189.764.324.578.

Mutasi peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 23.

Tabel 23
Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	189.764.324.578
Mutasi tambah tahun 2023:	
Transfer masuk	75.733.542
Pembelian	36.880.678.781
Pengembangan melalui KDP	1.715.240.376
Hibah Masuk	1.004.198.600
Penyelesaian KDP	4.274.262.000
Reklasifikasi masuk	-
Pengembangan nilai aset	3.503.554.000
Perolehan Lainnya	28.275.578.395
Koreksi Pencatatan	636.043.000
Total Mutasi Tambah	76.365.288.694
Mutasi kurang tahun 2023:	
Reklas keluar	-
Koreksi Pencatatan	28.276.778.395
Transfer Keluar	75.733.542
Penghentian aset dari penggunaan	6.094.309.941
Total Mutasi Kurang	34.446.821.878
Total Mutasi Tambah (Kurang)	41.918.466.816
Saldo per 31 Desember 2023	231.682.791.394
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(172.405.473.882)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	59.277.317.512

C.2.2 Peralatan dan Mesin (lanjutan)

Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin terdiri dari:

1. Transfer masuk ke Satker 417654 dari Satker 453374 sebesar Rp75.733.542.
2. Pembelian menggunakan belanja modal sebesar Rp36.880.678.781.
3. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp1.715.240.376.
4. Hibah masuk di satker 453374 sebesar Rp1.004.198.600.
5. Penyelesaian KDP sebesar Rp4.274.262.000.
6. Pengembangan nilai aset sebesar Rp3.503.554.000.
7. Perolehan lainnya sebesar Rp28.275.578.395.
8. Koreksi Pencatatan sebesar Rp636.043.000.

Transaksi Mutasi kurang peralatan dan mesin terdiri dari:

1. Koreksi pencatatan yang mengurangi nilai pencatatan di modul aset tetap SAKTI sebesar Rp28.276.778.395.
2. Transfer keluar dari satker 453374 ke satker 417654 sebesar Rp75.733.542.
3. Penghentian aset dari operasional kantor sebesar Rp6.094.309.941.

Gedung dan Bangunan
Rp231.903.803.902

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2022, yaitu sebesar Rp231.903.803.902 dan Rp227.693.849.784.

Gedung dan Bangunan PPATK per 31 Desember 2022, terdiri dari:

1. Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh Satker 453374 yaitu Gedung Kantor Permanen Gedung PPATK di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat dengan luas bangunan 16.630 m² senilai Rp132.652.125.817.
2. Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikelola oleh Satker 417654 sebesar Rp99.251.678.085, yaitu:

No	Uraian	NUP	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Sub Kelompok Barang	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Pusdiklat APUPPT (Cimanggis) di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.	1	6.502	69.433.003.277	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
2	Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat ; dan	3	122	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Dihapus
3	Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.	4	58	258.982.240	Klinik	Baik

4	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A8, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	5		285.424.800	Gudang	Baik
5	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A10, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	7		-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dihapus
6	Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A11, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	6		-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dihapus
7	Pagar permanen			322.414.070	Pagar Permanen	
8	Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Cimpaeun atas nama Wiwik Setyaji (A12) dengan Notaris Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn.	8	127	275.000.000	Gudang	Baik
9	Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Cimpaeun atas nama Nurlaila Sundari (No. A6) dengan Notaris Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn.	9	50	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Dihapus
10	Transfer masuk Gedung Arsip Ciloto	10		28.072.324.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat
11	Pengadaan Rumah berdasarkan Surat Perjanjian No:Perj-055/PL.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan BAST No: BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023	11		604.529.698	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
Total				99.251.678.085		

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.884.473.343.

Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 24.

C.2.3 Gedung dan Bangunan (lanjutan)

Tabel 24
Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	227.693.849.784
Gedung Kantor (Lokasi Jakarta Pusat)	128.158.288.773
Gedung Arsip (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	28.072.324.000
Gedung Pusdiklat APUPPT (Lokasi Depok Jawa Barat)	71.463.237.011
<i>Mutasi tambah tahun 2023:</i>	
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan Melalui KDP	1.349.995.000
Pengembangan Melalui KDP	4.638.202.920
Koreksi Pencatatan	-
Total Mutasi Tambah	5.988.197.920
<i>Mutasi kurang tahun 2023:</i>	
Reklasifikasi keluar	-
Koreksi Manual	634.843.000
Koreksi Pencatatan	771.465.302
Penghapusan	371.935.500
Total Mutasi Kurang	1.778.243.802
Total Mutasi Tambah (Kurang)	4.209.954.118
Saldo per 31 Desember 2023	231.903.803.902
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(31.884.473.343)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	200.019.330.559

Transaksi mutasi tambah gedung dan bangunan berasal dari KDP sebesar Rp5.988.197.920.

Transaksi Mutasi kurang gedung dan bangunan berasal dari penghapusan nilai gedung di satker pusdiklat sebesar Rp371.935.500, koreksi manual yang merupakan koreksi reklasifikasi pencatatan aset gedung dan bangunan pada satker 453374 sebesar Rp634.843.000, dan koreksi pencatatan yang merupakan perbaikan pencatatan nominal aset di pos gedung dan bangunan pada satker 453374 sebesar Rp771.465.302.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp235.602.000

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu sebesar Rp235.602.000 dan Rp235.602.000. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp140.399.454, dengan rincian mutasi dijelaskan dalam Tabel 25.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan (lanjutan)

Tabel 25
Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	235,602,000
<i>Mutasi tambah tahun 2023:</i>	
· Transfer masuk	-
Total Mutasi Tambah	-
<i>Mutasi kurang tahun 2023:</i>	
· Transfer keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	-
Saldo per 31 Desember 2023	235,602,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(140,399,454)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	95,202,546

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang di tahun 2023.

Aset Tetap Lainnya
Rp720.400.368

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu sebesar Rp720.400.368 dan Rp508.155.368 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya, antara lain buku perpustakaan dan benda seni. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dijelaskan dalam Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	508.155.368
<i>Mutasi tambah tahun 2023:</i>	
Pembelian	37.445.000
Hibah Masuk	174.800.000
Total Mutasi Tambah	212.245.000
<i>Mutasi kurang tahun 2023:</i>	
· Revaluasi Aset Lainnya	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	212.245.000
Saldo per 31 Desember 2023	720.400.368
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(56.528.750)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	663.871.618

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp99.017.550

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp99.017.550 dan Rp99.017.550. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini merupakan pengembangan nilai gedung dan bangunan (jasa perencana) di satker 417654 sebesar Rp99.017.550 perolehan tahun 2022, namun pekerjaan fisik belum dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp204.486.875.429

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp204.486.875.429 dan Rp176.983.269.960. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang dijelaskan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 2023	Nilai Buku per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 2022	Kenaikan (Penurunan)	
						Rp	%
1	Tanah	235.898.373.342	-	235.898.373.342	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	231.682.791.394	(172.405.473.882)	59.277.317.512	(149.211.581.008)	23.193.892.874	15,54
3	Gedung dan Bangunan	231.903.803.902	(31.884.473.343)	200.019.330.559	(27.606.068.164)	4.278.405.179	15,50
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.602.000	(140.399.454)	95.202.546	(118.799.538)	21.599.916	18,18
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.017.550	-	99.017.550	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	720.400.368	(56.528.750)	663.871.618	(46.821.250)	9.707.500	20,73
Jumlah		700.539.988.556	(204.486.875.429)	496.053.113.127	(176.983.269.960)	(27.503.605.469)	15,54

Aset Lainnya Rp18.872.648.333

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.872.648.333 dan Rp6.895.914.396 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp900.470.326 dan *software* ataupun aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya untuk operasional pemerintah dengan nilai buku sebesar Rp17.972.178.007. Rincian Nilai Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain) pada tanggal pelaporan dijelaskan dalam Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	44.857.359.660	37.963.344.052	6.894.015.608	18,16
2	Aset Lain-Lain	5.088.200.711	5.679.017.251	(590.816.540)	(10,40)
Jumlah		49.945.560.371	43.642.361.303	6.303.199.068	14,44
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi					
Aset Lainnya		(31.973.382.364)	(36.746.446.907)	4.773.064.543	(12,99)
Aset Lainnya		17.972.178.007	6.895.914.396	11.076.263.611	160,62

Aset Tak Berwujud
Rp44.857.359.660

C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak berwujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa *software* maupun antivirus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp44.857.359.660 dan Rp37.963.344.052.

C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB) (lanjutan)

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dijelaskan dalam Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	37.963.344.052
Mutasi tambah tahun 2023:	
Realisasi Belanja Modal Lainnya	1.712.938.840
Pengembangan nilai aset	120.000.000
Koreksi Pencatatan	16.539.190.920
Total Mutasi Tambah	18.372.129.760
Mutasi kurang tahun 2023:	
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11.363.229.152
Koreksi Pencatatan	114.885.000
Total Mutasi Kurang	11.478.114.152
Total Mutasi Tambah (Kurang)	6.894.015.608
Saldo per 31 Desember 2023	44.857.359.660
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(26.885.181.653)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	17.972.178.007

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.885.181.653.

Dana yang Dibatasi

Penggunaannya Rp900.470.326

C.3.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu sebesar Rp900.470.326 dan Rp0. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang sudah ditentukan penggunaannya untuk membayar tagihan atau kegiatan lainnya. Per 31 Desember 2023 seluruh Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang ditahan untuk pembayaran RPATA yang dibayarkan di Tahun 2024.

Aset Lain-lain Rp5.088.200.711

C.3.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu sebesar Rp5.088.200.711 dan Rp5.679.017.251. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan dalam proses penghapusan. Aset Lain-lain yang terdapat di PPATK per 31 Desember 2022 seluruhnya merupakan Aset Tak Berwujud (ATB) yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan selanjutnya akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan atas ATB yang tidak digunakan tersebut.

Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi Aset
Lainnya Rp31.973.382.364

C.3.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.973.382.364 dan Rp36.746.446.907. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 30.

C.3.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (lanjutan)

Tabel 30
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No	Aset Lain-Lain	Nilai per 31 Desember 2023	Akum. Penyusutan/Amor- tisasi 2023	Nilai Buku per 31 Desember 2023	Akum. Penyusutan/Amo- rtisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	
						Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	44.857.359.660	(26.885.181.653)	17.972.178.007	(31.569.542.240)	4.684.360.587	(14,84)
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	5.088.200.711	(5.088.200.711)	-	(5.176.904.667)	88.703.956	(1,71)
Jumlah		49.945.560.371	(31.973.382.364)	17.972.178.007	(36.746.446.907)	4.773.064.543	(12,99)

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek
Rp1.639.222.662

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.639.222.662 dan Rp421.653.201.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 31.

Tabel 31
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	1.630.257.245	413.331.118	1.216.926.127	294,42
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-
3	Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	8.965.417	8.322.083	643.334	7,73
5	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		1.639.222.662	421.653.201	1.217.569.461	288,76

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022, yaitu sebesar 288,76%. Hal ini disebabkan naiknya beban belanja akrual yang diakui di tanggal pelaporan.

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp1.630.257.245

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.630.257.245 dan Rp413.331.118, mengalami kenaikan sebesar Rp1.216.926.127 atau 294,42%

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga (lanjutan)

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp7.462.820 yang merupakan kekurangan pembayaran gaji untuk pegawai.
- b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp723.263.159 yang merupakan akrual pembayaran tagihan listrik, air dan telpon.
- c. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp899.531.266 yang berasal SPM RPTRA yang SP2D di tahun 2024.

*Utang Yang Belum Ditagihkan
Rp0*

C.4.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual pada saat pengakuan pencatatan BAST dari pihak ketiga. Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Hibah Yang Belum Disahkan
Rp0*

C.4.3 Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

*Pendapatan Diterima di Muka
Rp8.965.417*

C.4.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah disetor ke kas negara, tetapi barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.965.417 dan Rp8.322.083, mengalami kenaikan Rp643.334 atau 7,73%.

Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp8.965.417 merupakan jasa sewa yang masih harus diberikan PPATK kepada BRI atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin ATM dengan Perjanjian Sewa antara PPATK dengan BRI Cabang Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 September 2023 s.d. 31 Mei 2024 (1 tahun) sebesar Rp21.517.000 dengan nomor referensi NTPN AC5FA48VV5CFUD28 dan nomor Perjanjian: PERJ-01/PL.03.03/PPATKNI/2023 tanggal 8 September 2023.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.4.5 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya
sebesar Rp0

C.4.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kas yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

EKUITAS

Ekuitas Rp519.297.103.369

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp519.297.103.369 dan Rp490.854.198.651. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan
Pajak Lainnya Rp389.026.871

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp389.026.871 dan Rp234.845.803.

Perbandingan Rincian Pendapatan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada Tabel 32.

Tabel 32
Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan PNBPN Lainnya				
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	20.873.666	19.826.750	1.046.916	5,28
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	72.000.000	-	72.000.000	0,00
Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan	288.800.000	160.760.000	128.040.000	79,65
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.353.205	54.259.053	(46.905.848)	(86,45)
Jumlah Pendapatan PNBPN Lainnya	389.026.871	234.845.803	154.181.068	65,65

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp389.026.871 berasal dari:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.873.666 di satker 453374.
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi sebesar Rp72.000.000 yang merupakan pendapatan penggunaan asrama di satker 417654.
- Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebesar Rp288.800.000 di satker Pusdiklat APUPPT.
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp7.353.205.

Beban Pegawai
Rp146.524.787.576

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp146.524.787.576 dan Rp133.079.269.941. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 33.

Tabel 33
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	16.433.700.545	15.465.685.130	968.015.415	6,26
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	243.069	242.441	628	0,26
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.002.154.680	933.170.360	68.984.320	7,39
511122	Beban Tunj. Anak PNS	272.261.070	254.653.612	17.607.458	6,91
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	942.990.000	903.210.000	39.780.000	4,40
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.662.218.000	2.375.952.000	286.266.000	12,05
511125	Beban Tunj. PPh PNS	94.721.425	75.957.659	18.763.766	24,70
511126	Beban Tunj. Beras PNS	898.080.420	853.542.120	44.538.300	5,22
511129	Beban Uang Makan PNS	2.639.880.000	2.876.651.250	(236.771.250)	(8,23)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	262.075.000	233.490.000	28.585.000	12,24
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1.200.268.000	1.200.268.000	-	-
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	283.380.400	283.380.400	-	-
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	869.161.800	-	869.161.800	-
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	14.536	-	14.536	-
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	59.532.680	-	59.532.680	-
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	14.655.614	-	14.655.614	-
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	136.805.000	-	136.805.000	-
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	55.111.620	-	55.111.620	-
511628	Beban Uang Makan PPPK	198.360.000	-	198.360.000	-
512111	Beban Uang Honor Tetap	6.125.580.322	7.206.558.597	(1.080.978.275)	(15,00)
512211	Beban Uang Lembur	488.880.000	402.884.000	85.996.000	21,35
512212	Beban Uang Lembur PPPK	14.002.000	-	14.002.000	-
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	107.950.626.590	100.013.624.372	7.937.002.218	7,94
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3.920.084.805	-	3.920.084.805	-
Total Beban Pegawai		146.524.787.576	133.079.269.941	13.445.517.635	10,10

Terdapat kenaikan realisasi Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar 10,10% dibanding realisasi Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Kenaikan Beban Pegawai, antara lain disebabkan:

1. Beban Gaji Pokok PNS naik sebesar Rp968.015.415 atau sebesar 6,26% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.
2. Beban Pembulatan Gaji PNS naik sebesar Rp628 atau sebesar 0,26% karena kenaikan pangkat/golongan PNS dan penambahan jumlah CPNS/PNS.
3. Beban Tunjangan Suami/Istri PNS naik sebesar Rp68.984.320 atau sebesar 7,39%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai yang menikah.
4. Beban Tunjangan Anak PNS naik sebesar Rp17.607.458 atau sebesar 6,91% antara lain karena penambahan jumlah tanggungan PNS.

D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

5. Beban Tunj. Struktural PNS naik sebesar Rp39.780.000 atau sebesar 4,40% antara lain karena sebagian besar posisi jabatan struktural telah diduduki.
6. Beban Tunjangan Fungsional PNS naik sebesar Rp286.266.000 atau sebesar 12,05% karena penambahan jumlah pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu, antara lain Pranata Komputer, Pranata Humas, Analis Anggaran, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Analis Transaksi Keuangan, dan Widyaiswara.
7. Beban Tunjangan PPh PNS naik sebesar Rp18.763.766 atau sebesar 24,70%, antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
8. Beban Tunjangan Beras PNS naik sebesar Rp44.538.300 atau sebesar 5,22% antara lain karena penambahan jumlah pegawai PNS/CPNS.
9. Beban Tunjangan Umum PNS naik sebesar Rp28.585.000 atau 12,24% karena bertambahnya pegawai yang berjabatan fungsional umum.
10. Beban Gaji Pokok PPPK sebesar Rp869.161.800 atau sebesar 0,00% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
11. Beban Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp14.536 atau sebesar 0,00% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
12. Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK sebesar Rp59.532.680 atau sebesar 0,00% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
13. Beban Tunjangan Anak PPPK sebesar Rp14.655.614 atau sebesar 0,00% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
14. Beban Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp136.805.000 atau sebesar 0,00% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
15. Beban Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp55.111.620 atau sebesar 0,00% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
16. Beban Uang Makan PPPK sebesar Rp198.360.000 atau sebesar 0,00% karena kebijakan penggunaan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.
17. Beban Uang Lembur naik sebesar Rp85.996.000 atau sebesar 21,35% karena peningkatan frekuensi kegiatan lembur.

D.2. Beban Pegawai (lanjutan)

18. Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) naik sebesar Rp7.937.002.218 atau sebesar 7,94% karena kenaikan pangkat/golongan PNS, penambahan jumlah CPNS, dan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 beserta 50% Tunjangan Khusus/Kegiatan.
19. Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp3.920.084.805 atau sebesar 0,00% karena kebijakan menggunakan akun tersebut untuk pembayaran pegawai yang berstatus sebagai PPPK.

Penurunan Beban Pegawai, antara lain disebabkan:

1. Beban Uang Makan PNS sebesar Rp236.771.250 atau 8,23% karena bertambahnya pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sehingga uang makan yang dibayarkan berkurang.
2. Beban Uang Honor Tetap sebesar Rp1.080.978.275 atau 15,00% karena berkurangnya jumlah PPNPN.

Beban Persediaan
Rp3.094.813.449

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.094.813.449 dan Rp2.380.143.014.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 34.

Tabel 34
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	2.818.663.229	2.173.556.149	645.107.080	29,68
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	14.661.634	12.058.606	2.603.028	21,59
593149	Beban Persediaan Lainnya	261.488.586	194.528.259	66.960.327	34,42
Total Beban Persediaan		3.094.813.449	2.380.143.014	714.670.435	30,03

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Pada periode 31 Desember 2023, terdapat peningkatan Beban Persediaan sebesar 30,03%. Terdiri dari:

1. Beban Persediaan Konsumsi naik sebesar Rp645.107.080 atau 29,68% karena terdapat peningkatan kebutuhan persediaan diklat. Kegiatan diklat telah dilakukan secara tatap muka dan terdapat peningkatan kebutuhan persediaan ATK dan *toner printer*.
2. Beban Persediaan Bahan Baku naik sebesar Rp2.603.028 atau 21,59% antara lain disebabkan meningkatnya pemakaian bahan kebersihan dibandingkan pemakaian tahun sebelumnya.

D.3 Beban Persediaan (lanjutan)

3. Beban Persediaan Lainnya naik sebesar Rp66.960.327 atau 34,42% karena penggunaan kebutuhan persediaan obat-obatan di klinik dokter umum dan dokter gigi.

Beban Barang dan Jasa
Rp35.797.317.056

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp35.797.317.056 dan Rp40.316.651.844. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 35.

Tabel 35
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Beban Barang				
521111	Beban Keperluan Perkantoran	9.346.114.813	8.200.647.630	1.145.467.183	13,97
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	182.789.706	293.286.239	(110.496.533)	(37,68)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	42.720.000	22.677.000	20.043.000	88,38
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	520.955.219	417.721.000	103.234.219	24,71
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.166.162.403	(1.166.162.403)	(100,00)
521211	Beban Bahan	3.145.843.673	2.290.285.135	855.558.538	37,36
521213	Beban Honor Output Kegiatan	1.178.000.000	264.000.000	914.000.000	346,21
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.395.944.919	1.757.696.894	1.638.248.025	93,20
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
	Beban Jasa				
522111	Beban Langganan Listrik	5.298.806.099	4.225.499.400	1.073.306.699	25,40
522112	Beban Langganan Telepon	159.928.724	153.264.023	6.664.701	4,35
522113	Beban Langganan Air	4.061.200	1.681.910	2.379.290	141,46
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.306.523.520	1.922.955.393	383.568.127	19,95
522131	Beban Jasa Konsultan	2.840.959.915	2.458.481.028	382.478.887	15,56
522141	Beban Sewa	3.222.990.660	2.363.642.639	859.348.021	36,36
522151	Beban Jasa Profesi	1.684.545.340	1.410.209.000	274.336.340	19,45
522191	Beban Jasa Lainnya	2.193.741.268	12.839.309.322	(10.645.568.054)	(82,91)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	527.203.828	(527.203.828)	(100,00)
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	273.392.000	1.929.000	271.463.000	14.072,73
	Total Beban Barang dan Jasa	35.797.317.056	40.316.651.844	(4.519.334.788)	(11,21)

Pada 31 Desember 2023 terdapat Kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar 11,21%, terdiri dari:

D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

1. Beban Keperluan Perkantoran naik sebesar Rp1.145.467.183 atau 13,97% antara lain pengadaan pakaian dinas (KORPRI PNS), Penghasilan PPNPN (Tenaga Pengamanan, Pengemudi, dan Pramubakti), air minum pegawai, pengisian etoll, kopi, susu, gula, teh, permen, jas hujan, microphone, box container, biaya materai KKP, pembelian jamuan tamu/pimpinan/Eselon I, linen kantor (taplak meja makan), pemenuhan asrama (alas duduk, kain sofa asrama, antena TV, remote TV, dan sandal asrama), dan laundry perlengkapan asrama.
2. Beban Honor Operasional Satuan Kerja naik sebesar Rp20.043.000 atau 88,38% disebabkan pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran.
3. Beban Barang Operasional Lainnya naik sebesar Rp103.234.219 atau 24,71% karena karena pengadaan MCU dan swab serta pengadaan alat test narkoba.
4. Beban Bahan naik sebesar Rp855.558.538 atau 37,36% antara lain disebabkan peningkatan kegiatan rapat, kegiatan lainnya secara luring, pembayaran pembelian konsumsi, pembuatan plakat, dan pembelian bendera Komite TPPU;.
5. Beban Honor Output Kegiatan naik sebesar Rp914.000.000 atau 346,21% antara lain disebabkan pembayaran honorarium atas kegiatan Komite TPPU.
6. Beban Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.638.248.025 atau 93,20% dikarenakan peningkatan pelatihan pegawai PPAK, pembayaran laundry pakaian peserta pelatihan, pengadaan bendera Merah Putih, dan pengadaan umbul-umbul ASEAN dan HUT PPAK.
7. Beban Langganan Listrik naik sebesar Rp1.073.306.699 atau 25,40% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.
8. Beban Langganan Telpon naik sebesar Rp6.664.701 atau 4,35% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional kantor.
9. Beban Langganan Air naik sebesar Rp2.379.290 atau 141,46% disebabkan meningkatnya kegiatan operasional di kantor.
10. Beban Langganan daya dan Jasa Lainnya naik sebesar Rp383.568.127 atau 19,95% disebabkan pembayaran Langganan Lisensi Software Manajemen Perkantoran (cloud storage google drive, template lisensi unit kegiatan pelatihan, aplikasi absensi pegawai Gedung Arsip Ciloto, langganan akun aplikasi Canva, langganan aplikasi Articulate 360, langganan internet Pusdiklat APU PPT dan Gedung Arsip Ciloto, Lisensi Aplikasi Video Conference dan layanan internet gedung Wisma Mandiri.
11. Belanja Jasa Konsultan naik sebesar Rp382.478.887 atau 15,56% karena meningkatnya kegiatan yang membutuhkan ahli untuk pencapaian output.
12. Beban Sewa naik sebesar Rp859.348.021 atau 36,36% antara lain disebabkan bertambahnya sewa kendaraan dinas Eselon II di PPAK.

D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

13. Beban Jasa Profesi naik sebesar Rp274.336.340 atau 19,45% antara lain disebabkan karena penggunaan narasumber eksternal di beberapa kegiatan.
14. Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp271.463.000 atau 100,00% karena beberapa pengadaan menggunakan belanja modal dan hibah yang diterima yang di bawah nilai kapitalisasi.

Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi pada:

1. Beban Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat turun sebesar Rp110.496.533 atau 37,68% disebabkan pengiriman undangan dan surat dilakukan secara daring.
2. Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 turun sebesar Rp1.166.162.403 atau 100,00% karena akun tersebut tidak lagi digunakan.
3. Beban Jasa Lainnya turun sebesar Rp10.645.568.054 atau 82,91% disebabkan menurunnya jumlah hibah jasa yang diterima PPA TK.
4. Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 turun sebesar Rp527.203.828 atau 100,00% karena akun tersebut tidak lagi digunakan.

Beban Pemeliharaan
Rp23.630.029.137

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.630.029.137 dan Rp23.440.250.924. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Persediaan Suku Cadang, dan Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 36.

Tabel 36
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.015.272.191	2.814.042.867	(798.770.676)	(28,39)
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	437.373.311	441.848.124	(4.474.813)	(1,01)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.862.810.667	15.383.021.047	1.479.789.620	9,62
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	4.035.121.960	4.475.298.660	(440.176.700)	(9,84)
593113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	192.114.239	186.252.954	5.861.285	3,15
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	87.336.769	133.793.272	(46.456.503)	(34,72)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	5.994.000	(5.994.000)	(100,00)
Total Beban Pemeliharaan		23.630.029.137	23.440.250.924	189.778.213	0,81

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,81%.

D.5 Beban Pemeliharaan (lanjutan)

Peningkatan realisasi Beban Pemeliharaan disebabkan, sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp1.479.789.620 atau 9,62% disebabkan terdapat karena perpanjangan lisensi yang meningkat di tahun 2023.
2. Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan sebesar Rp5.861.285 atau 3,15% karena meningkatnya penggunaan bahan persediaan di tahun 2023.

Penurunan Beban Pemeliharaan disebabkan:

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp798.770.676 atau 28,39% karena beberapa pekerjaan pemeliharaan telah dilakukan di tahun 2022.
2. Beban Asuransi Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.474.813 atau 1,01% karena berkurangnya premi di tahun 2023.
3. Beban Pemeliharaan Lainnya turun sebesar Rp440.176.700 atau 9,84% karena berkurangnya kegiatan pemeliharaan.
4. Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp46.456.503 atau 34,72% karena penggunaan persediaan berkurang.

Beban Perjalanan Dinas
Rp22.645.414.992

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.645.414.992 dan Rp12.984.131.783. Beban tersebut adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 37.

Tabel 37
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.791.656.241	5.111.245.842	4.680.410.399	91,57
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	501.770.000	388.836.333	112.933.667	29,04
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.357.304.285	3.540.799.370	(1.183.495.085)	(33,42)
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.133.722.846	2.545.945.600	2.587.777.246	101,64
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	81.184.473	-	81.184.473	0,00
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	4.779.777.147	1.397.304.638	3.382.472.509	242,07
Total Beban Perjalanan Dinas		22.645.414.992	12.984.131.783	9.661.283.209	74,41

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar 74,41% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas disebabkan, antara lain:

1. Beban Perjalanan Dinas Biasa naik sebesar Rp4.680.420.399 atau 91,57% karena meningkatnya kegiatan perjalanan dinas dan audit.
2. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota naik sebesar Rp112.933.667 atau 29,04% karena meningkatnya kegiatan koordinasi dan kegiatan.
3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota naik sebesar Rp2.587.777.246 atau 101,64% karena meningkatnya kegiatan koordinasi dan sosialisasi.
4. Beban Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri sebesar Rp81.184.473 atau 0,00% karena meningkatnya kegiatan koordinasi dan event di luar negeri.
5. Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri naik sebesar Rp3.382.472.509 atau 242,07% karena meningkatnya kegiatan koordinasi dan event di luar negeri.

Penurunan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota turun sebesar Rp1.183.495.085 atau 33,42% karena karena berkurangnya kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp38.644.362.187

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp38.644.362.187 dan Rp31.678.404.427.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 38.

Tabel 38
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.633.673.391	21.524.033.447	7.109.639.944	33,03
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.304.440.664	4.401.878.907	(97.438.243)	(2,21)
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18.745.250	18.745.250	-	-
591313	Beban Penyusutan Jaringan	2.854.666	2.854.666	-	-
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.707.500	9.707.500	-	-
592115	Beban Amortisasi Software	4.121.308.888	5.707.631.791	(1.586.322.903)	(27,79)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	1.553.631.828	8.120.860	1.545.510.968	19.031,37
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	-	-	-	-
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	-	5.432.006	(5.432.006)	(100,00)
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		38.644.362.187	31.678.404.427	6.965.957.760	21,99

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi (lanjutan)

Kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi disebabkan oleh:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.109.639.944 atau 33,03% dikarenakan bertambahnya jumlah peralatan dan mesin di PPATK.
2. Beban Amortisasi Lisensi sebesar Rp1.545.510.968 atau 19.031,37% dikarenakan koreksi pencatatan dari belanja barang menjadi aset dari pemeriksaan BPK.

Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari:

1. Penurunan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp97.438.243 atau 2,21% dikarenakan telah habisnya masa penyusutan beberapa gedung di PPATK.
2. Penurunan Beban Amortisasi Software sebesar Rp1.586.322.903 atau 27,79% dikarenakan berkurangnya jumlah software di PPATK.
3. Penurunan Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp5.432.006 atau 100,00% karena nilai buku aset di dalam pos tersebut sudah nihil.

*Pendapatan Pelepasan Aset
Non Lancar Rp988.496.967*

D.8 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp988.496.967 dan Rp846.394.370.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp988.496.967, terdiri dari:

1. Risalah Lelang Nomor 118/28/2023 sebesar Rp71.000.000, Bukti Penerimaan Negara NTPN AC9336U8EL0KINMJ tanggal 2 Maret 2023.
2. Risalah Lelang Nomor 420/32/2023 sebesar Rp27.212.411, Bukti Penerimaan Negara NTPN 4BC102G4VG538I6K tanggal 16 Maret 2023.
3. Risalah Lelang Nomor 170/28/2023 sebesar Rp72.999.999, Bukti Penerimaan Negara NTPN D4OCBBN3EA67T1E3 tanggal 30 Maret 2023.
4. Risalah Lelang Nomor 291/28/2023 sebesar Rp469.499.000, Bukti Penerimaan Negara NTPN 434832G4VGDTG1HU tanggal 8 Juni 2023.
5. Risalah Lelang Nomor 475/28/2023 sebesar Rp.163.999.999, Bukti Penerimaan Negara NTPN B2EBF3CIFB9G467V tanggal 21 September 2023.
6. Risalah Lelang Nomor 382/28/2023 sebesar Rp.61.234.560, Bukti Penerimaan Negara NTPN 22B2961QUQT9HMA4 tanggal 8 Agustus 2023.
7. Risalah Lelang Nomor 615/28/2023 sebesar Rp64.153.000, Bukti Penerimaan Negara NTPN 7DC3148W61RHH08 tanggal 21 November 2023.

D.8 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar (lanjutan)

8. Risalah Lelang Nomor 682/28/2023 sebesar Rp15.186.000, Bukti Penerimaan Negara NTPN FF58BON9VRR217HM tanggal 14 Desember 2023.
9. Lelang hasil bongkaran gedung multimedia sebesar Rp5.081.000 di satker 417654.
10. Lelang hasil bongkaran material bangunan kantor sebesar Rp16.000.999 di satker 417654.
11. Lelang hasil bongkaran materi bangunan sebesar Rp22.129.999 di satker 417654.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp1.874.626.873

D.9 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang timbul dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.874.626.873 dan Rp10.234.400. Beban tersebut berasal dari penghapusan bangunan gedung kantor dan notebook.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp318.297.041

D.10 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan dari Kegiatan Non laporan operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp318.297.041 dan Rp568.909.265.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, terdiri dari:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp266.048.456 yang berasal dari tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022.
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp42.815.405 yang berasal dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022.
3. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp5.360.020.
4. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp4.073.160.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp4.017.518

D.11 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.017.518 dan Rp80.747.051.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari Kerugian Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp4.017.518.

*Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (LO)
Rp571.850.383*

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (LO)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (LO) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp571.850.383 dan Rp1.324.322.184.

*Surplus/Defisit Laporan Operasi
(Rp270.519.547.909)*

D.13 Surplus/Defisit Laporan Operasi

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar (Rp270.519.547.909) dan (Rp242.723.359.648). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp490.854.198.651*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp490.854.198.651 dan Rp507.788.325.127.

*Surplus(defisit) LO
(Rp270.519.547.909)*

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar (Rp270.519.547.909) dan (Rp242.723.359.648). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
(Rp668.070.625)*

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp668.070.625) dan (Rp83.729.364). Koreksi yang mengurangi Ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2023 berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar (Rp631.842.999) yang disebabkan oleh perbaikan pencatatan BMN yang berdampak ke nilai buku, yang merupakan koreksi pencatatan yang dilakukan di Satker 453374 dan 417654, dan koreksi yang mengurangi ekuitas berasal dari koreksi lain-lain sebesar (Rp36.227.626).

Transaksi Antar Entitas
Rp299.630.523.252

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain. Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp299.630.523.252 dan Rp225.872.962.536. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada Tabel 39.

Tabel 39
Rincian Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	295.324.440.555	213.502.849.440	81.821.591.115	38,32
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.691.517.303)	(1.218.748.310)	(472.768.993)	38,79
313211	Transfer Keluar	-	(33.553.535.579)	33.553.535.579	(100,00)
313221	Transfer Masuk	-	33.553.535.579	(33.553.535.579)	(100,00)
391131	Pengesahan Hibah Langsung	5.997.600.000	13.588.861.406	(7.591.261.406)	(55,86)
Total Transaksi Antar Entitas		299.630.523.252	225.872.962.536	73.757.560.716	32,65

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp295.324.440.555

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp295.324.440.555 dan Rp213.502.849.440. Ditagihkan ke entitas lain, antara lain lain Pembayaran Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan, Jasa Laundry, Pembayaran Honorarium Pengajar, Pembelian Keperluan Sehari-Hari Perkantoran, Pengadaan Jasa Hygiene Service dan Pest Control, Pembelian Suku Cadang Perbaikan Elevator, Pengadaan Peralatan Zoom, Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur, dan Pengadaan Persediaan Obat Klinik.

Diterima dari Entitas Lain
(Rp1.691.517.303)

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.691.517.303) dan (Rp1.218.748.310).

Diterima dari Entitas Lain Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp1.691.517.303), berasal dari:

1. Satker 453374 sebesar (Rp1.244.796.423) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp930.098.969.
 - b. Pendapatan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp15.186.000 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain (lanjutan)

- c. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp21.517.000 atas sewa mesin ATM BRI untuk masa sewa 1 September 2023 s.d. 31 Mei 2024 (1 tahun).
 - d. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp5.360.020.
 - e. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp6.420.990.
 - f. Penerimaan Kembali Belanja pegawai TAYL sebesar Rp266.048.444 dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022.
 - g. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp165.000 dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022.
2. Satker 417654 sebesar (Rp446.720.880) terdiri dari:
- a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp43.211.998.
 - b. Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp72.000.000.
 - c. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp288.800.000.
 - d. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp58.465.
 - e. Pendapatan Penerimaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp12.
 - f. Pendapatan Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp42.650.405

Transfer Keluar Rp0

E.4.3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal PPATK. Transfer Keluar yang terjadi di PPATK berupa transfer keluar gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan dan jaringan karena adanya pemisahan catatan BMN di Satker Kantor Pusat dengan Satker Pusdiklat APUPPT. Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan (Rp33.553.535.579).

Transfer Masuk Rp0

E.4.4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal PPATK. Transfer Masuk yang terjadi di PPATK berupa transfer masuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan dan jaringan karena adanya pemisahan catatan BMN di Satker Kantor Pusat dengan Satker Pusdiklat APUPPT sebagai upaya pengendalian catatan awal BMN di Satker Pusdiklat APUPPT yang baru mulai beroperasi pada tahun 2018. Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp33.553.535.579.

Pengesahan Hibah Langsung
Rp5.997.600.000**E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung berupa barang dan jasa yang sudah diterima PPATK dan telah disahkan oleh KPPN Jakarta VI. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.997.600.000 dan Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp519.297.103.369**E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp519.297.103.369 dan Rp490.854.198.651.

5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**F.1 Tuntutan Hukum**

Sampai dengan 31 Desember 2023, PPATK tidak memiliki tuntutan hukum yang berdampak pada penyerahan aset atau timbulnya kewajiban.

Tabel 40

Daftar Tuntutan Hukum

untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

No	Penggugat	Tergugat	Uraian Perkara	No. Dan Uraian Putusan	Keterangan
----- Tidak ada -----					

A

F.2 Hibah yang Diterima

Sampai dengan 31 Desember 2023, PPATK menerima hibah berupa Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin. Hibah tersebut diterima dengan rincian:

Tabel 41
Rincian Hibah Yang Diterima
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

No.	Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Nilai (Rp)
1	Renovasi Pos Jaga dan Gerbang	1	Paket	573.500.000
2	Renovasi Toilet Basement	1	Paket	114.450.000
3	Relayout Lantai 3	1	Paket	2.857.500.000
4	Relayout Lantai 6	1	Paket	1.876.500.000
5	Renovasi Lapangan	1	Paket	67.500.000
6	Kanopi	1	Paket	80.750.000
7	Gazebo	1	Paket	352.500.000
8	Renovasi Masjid	1	Paket	55.750.000
9	Solar Panel	6	Unit	19.150.000
Total				5.997.600.000

Hibah tersebut diterima dari perorangan an.ZM melalui BAST nomor BAST/01/PL.04/VIII/2023.

Pengesahan Hibah tersebut dilakukan melalui KPPN Jakarta VI dengan dokumen:

1. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) NoT/50/KU.05/IX/2023 tanggal 13 September 2023
2. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Bentuk Barang Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) No T/6/KU.05/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
3. Memo Pengesahan Hibah Langsung (MPHL) No 1442A tanggal 25 September 2023
4. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 812437388854202428 tanggal 27 September 2023.

F.3 Penggunaan Gedung Operasional

Sehubungan dengan dilaksanakannya renovasi Gedung perkantoran di alamat Jl. Ir. Hj. Djuanda no.35, PPATK menggunakan Gedung Wisma Mandiri 2 selama periode 9 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan perjanjian No 007A/PKS-UG/VIII/2022 tanggal 9 Agustus Tahun 2022 dan diperpanjang kembali selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai perjanjian No 017/PKS-UG/II/2023 tanggal 2 Januari 2023.

F.4 Capaian Output Strategis

Sampai dengan 31 Desember 2023, output strategis yang telah dicapai PPATK dalam program Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

- a. 461 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor korupsi, fiskal, dan pemberian informasi yang bekerjasama dengan APGAKUM.

F.4 Capaian Output Strategis (lanjutan)

b. 317 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana lain, serta dugaan tindak pidana terorisme yang bekerjasama dengan APGAKUM, DJBC dan DJP.

c. 522 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif

d. 534 Personel APGAKUM telah menerima pelatihan di bidang TPPU dan TPPT.

Tabel 42
Rincian Output Strategis
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	02.BCE.001	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi	1,615,500,000	1,615,253,233	99.98%	357	461	129.13%
2	01.BCE.002	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	1,649,728,000	1,649,499,235	99.99%	232	317	136.64%
3	01.BCE.003	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif	1,178,711,000	1,178,513,763	99.98%	426	522	122.54%
4	01.SCF.002	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1,383,720,000	1,383,699,461	100.00%	460	534	116.09%

F.5 Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada PPAK (BA078) dapat diklasifikasikan ke dalam 1 fungsi yaitu Pelayanan Umum (01), berikut sampaikan rincian dimaksud:

Tabel 43
Rincian Output
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	955	Layanan Manajemen Keuangan	41,700,000.00	39,752,244.00	95.33%	2	2	Dokumen	100.00%
2	961	Layanan Reformasi Kinerja	5,589,000.00	5,584,000.00	99.91%	2	2	Laporan	100.00%
3	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	94,754,000.00	91,842,419.00	96.93%	1	1	Dokumen	100.00%
4	954	Layanan Manajemen SDM	154,793,000.00	148,764,137.00	96.11%	101	101	Orang	100.00%
5	962	Layanan Umum	183,793,000.00	180,027,319.00	97.95%	1	1	Layanan	100.00%
6	994	Layanan Perkantoran	8,725,687,000.00	8,711,499,122.00	99.84%	1	1	Layanan	100.00%
7	951	Layanan Sarana Internal	1,418,574,000.00	1,416,613,873.00	99.86%	174	176	Unit	101.15%
8	971	Layanan Prasarana Internal	1,445,000,000.00	1,439,988,520.00	99.65%	5	5	Unit	100.00%
9	'001	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pihak Pelapor	2,238,186,000.00	2,233,157,773.00	99.78%	1650	1691	Orang	102.48%
10	'002	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1,383,720,000.00	1,383,699,461.00	100.00%	460	534	Orang	116.09%
11	994	Layanan Perkantoran	13,337,121,000.00	13,295,500,210.00	99.69%	1	1	Layanan	100.00%
12	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18,420,000.00	17,395,870.00	94.44%	3	3	Dokumen	100.00%
13	'001	Pengelolaan Pihak Pelapor	87,863,000.00	87,858,260.00	99.99%	600	5026	Unit Kerja	837.67%
14	'002	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan	135,292,000.00	135,289,985.00	100.00%	200	332	Lembaga	166.00%
15	'003	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	372,363,000.00	372,348,418.00	100.00%	400	481	Lembaga	120.25%
16	'004	Evaluasi Kualitas Data Laporan dari Pihak Pelapor	98,790,000.00	98,335,415.00	99.54%	105	127	Unit Kerja	120.95%
17	'001	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Jasa Keuangan	681,595,000.00	680,933,643.00	99.90%	60	66	laporan	110.00%
18	'002	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia	998,684,000.00	998,011,277.00	99.93%	16	16	Dokumen	100.00%
19	'004	Kerjasama Luar Negeri	4,981,888,000.00	4,981,832,248.00	100.00%	14	15	Dokumen	107.14%
20	'001	Pemantauan Tindak Lanjut Dukungan Perkata PPAK	368,133,000.00	366,906,583.00	99.67%	10	11	Perkara	110.00%
21	'001	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hukum dan HAM	372,810,000.00	372,714,520.00	99.97%	24	27	Rekomendasi Kebijakan	112.50%
22	'001	Pemberian Penanganan Bantuan Hukum	323,693,000.00	323,096,814.00	99.82%	142	157	Perkara	110.56%
23	'001	Penyusunan Dokumen Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT	1,443,836,000.00	1,443,113,014.00	99.95%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00%
24	'002	Penyusunan Dokumen NRA dan SRA	386,595,000.00	386,573,182.00	99.99%	3	3	Kajian	100.00%
25	'003	Penyusunan Dokumen RRA	67,999,000.00	67,997,000.00	100.00%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00%

F.5 Capaian Output per Fungsi APBN (lanjutan)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume	Realisasi Volume	Satuan	%
26	'001	Kerjasama Dalam Negeri	388.568.000,00	371.103.116,00	95,51%	25	26	Dokumen	104,00%
27	'001	Penyusunan Dokumen Legislasi	1.035.973.000,00	1.035.883.337,00	99,99%	21	24	peraturan	114,29%
28	959	Layanan Protokol	984.022.000,00	981.610.143,00	99,75%	1	1	Layanan	100,00%
29	962	Layanan Umum	974.686.000,00	974.208.409,00	99,95%	1	1	Layanan	100,00%
30	994	Layanan Perkantoran	21.683.176.000,00	21.644.713.080,00	99,82%	1	1	Layanan	100,00%
31	951	Layanan Sarana Internal	11.421.236.000,00	11.421.225.226,00	100,00%	171	171	Unit	100,00%
32	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	55.235.000,00	55.005.817,00	99,59%	1	1	Dokumen	100,00%
33	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	524.508.000,00	524.329.647,00	99,97%	5	5	Dokumen	100,00%
34	954	Layanan Manajemen SDM	1.584.702.000,00	1.583.869.736,00	99,95%	371	392	Orang	105,66%
35	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5.540.082.000,00	5.529.834.267,00	99,82%	400	401	Orang	100,25%
36	956	Layanan BMN	43.400.000,00	43.398.845,00	100,00%	5	5	Laporan	100,00%
37	958	Layanan Hubungan Masyarakat	345.650.000,00	344.569.190,00	99,69%	1	1	Layanan	100,00%
38	'001	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi	1.615.500.000,00	1.615.253.233,00	99,98%	357	461	Perkara	129,13%
39	'002	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor dugaan tindak pidana terorisme	1.649.728.000,00	1.649.187.835,00	99,97%	232	317	Perkara	136,64%
40	'003	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif	1.178.711.000,00	1.178.513.763,00	99,98%	426	522	Perkara	122,54%
41	965	Layanan Audit Internal	280.387.000,00	280.376.731,00	100,00%	71	90	Laporan	126,76%
42	994	Layanan Perkantoran	132.787.943.000,00	133.242.502.119,00	100,34%	1	1	Layanan	100,00%
43	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	104.911.000,00	104.908.524,00	100,00%	2	2	Dokumen	100,00%
44	955	Layanan Manajemen Keuangan	72.672.000,00	72.618.246,00	99,93%	2	2	Dokumen	100,00%
45	961	Layanan Reformasi Kinerja	19.574.000,00	19.485.599,00	99,55%	2	2	Laporan	100,00%
46	'002	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	985.895.000,00	985.636.337,00	99,97%	115	138	laporan	120,00%
47	'003	Dokumen Ketentuan Kebijakan di Bidang Pelaporan	1.620.803.000,00	1.620.790.331,00	100,00%	76	81	laporan	106,58%
48	'001	Edukasi Publik	2.044.806.000,00	2.041.668.966,00	99,85%	1	1	layanan	100,00%
49	'001	Sarana PTI	35.368.955.000,00	35.368.834.898,00	100,00%	43	43	Unit	100,00%
50	'001	OM Sarana Teknologi Informasi	30.915.928.000,00	30.913.868.334,00	99,99%	245	245	Unit	100,00%
51	'001	Dokumen Financial Integrity Rating	2.512.490.000,00	2.512.479.683,00	100,00%	5	5	Rekomendasi Kebijakan	100,00%

F.6 Program Prioritas Nasional

Dalam Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada PPATK untuk Satuan Kerja Pusdiklat APUPPT terdapat alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya diantaranya melalui satu program prioritas, satu kegiatan prioritas, yang berada di satu Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp1.383.720.000 dan realisasi sebesar Rp1.383.699.461 dengan rincian dijelaskan dalam Tabel 44.

Tabel 44
Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Pusdiklat APU PPT	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme/Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK bagi Aparat Penegak Hukum	1.383.720.000	1.383.699.461	99,99 %	Orang	460	534	116,09%

F.6 Program Prioritas Nasional (lanjutan)

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Pusdiklat APU PPT memiliki Prioritas Nasional pada tahun 2023, yaitu target peserta Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum Tahun 2023 sejumlah 460 orang peserta. Realisasi pencapaian output dari Prioritas Nasional sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sejumlah 534 orang peserta. Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum dijelaskan dalam Tabel 45.

Tabel 45
Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Diklat bagi APGAKUM	Perencanaan		Realisasi	
			Total Peserta	Asal Instansi Peserta	Total Peserta	Asal Instansi Peserta
1	24 - 27 Jan	Pelatihan Penanganan TPPU Batch 1	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejagung RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	31	BPOM, PPATK, DJBC, POLRI, KKP, BNNP, DJP, Kejaksaan RI, BP2MI, BP3MI Jakarta
2	21 - 24 Feb	Pelatihan Penanganan TPPU Batch 2	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejagung RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	37	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejagung RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK
3	7 - 10 Mar	Pelatihan Penanganan TPPU (Medan)	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejagung RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	54	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejagung RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK
4	3-14 Apr	Teknis Analisis TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Joint Training)	30	BNN	40	BNN dan PPATK
5	9-11 May	Pemulihan Aset dari Kejahatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30	BNN, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyidikan pada JAM Pidsus, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Dittipidanarkoba Bareskrim Polri, Dittipideksus Bareskrim Polri, Dittipidkor Bareskrim Polri, Dittipidkor	29	BNN, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyidikan pada JAM Pidsus, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Dittipidanarkoba Bareskrim Polri, Dittipideksus Bareskrim Polri, Dittipidkor Bareskrim Polri, Dittipidkor Bareskrim

				Bareskrim Polri, Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari, KPPBC TMP B Kualanamu, KPPBC TMP C Tanjungpandan, PPATK		Polri, Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari, KPPBC TMP B Kualanamu, KPPBC TMP C Tanjungpandan, PPATK
6	9-11 May	Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional	30	BNN, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyidikan pada JAM Pidsus, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Dittipidanarkoba Bareskrim Polri, Dittipideksus Bareskrim Polri, Dittipidkor Bareskrim Polri, Dittipidkor Bareskrim Polri, Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari, KPPBC TMP B Kualanamu, KPPBC TMP C Tanjungpandan, PPATK	33	BNN, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyidikan pada JAM Pidsus, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Dittipidanarkoba Bareskrim Polri, Dittipideksus Bareskrim Polri, Dittipidkor Bareskrim Polri, Dittipidkor Bareskrim Polri, Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari, KPPBC TMP B Kualanamu, KPPBC TMP C Tanjungpandan, PPATK
7	4-6 Juli	Investigasi Keuangan Batch 1	30	PPATK, Badan POM RI, Bappebti, Bareskrim Polri, BNN RI, BP2MI Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejaksaan Agung, KKP, Otoritas Jasa Keuangan	33	BNN, BNNP, BPOM, Kejaksaan Agung, Diskrimsus POLDA, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Ditresnarkoba POLDA, PPATK, KKP, KLHK, DJP, DJBC
8	14-16 Agustus	Penanganan TPPU Tingkat Lanjutan (Studi Kasus) Batch 1	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	28	BNN, BNNP, BPOM, Kejaksaan Agung, Diskrimsus POLDA, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Ditresnarkoba POLDA, PPATK, KKP, KLHK, DJP, DJBC
9	22 - 24 Agustus	Investigasi Keuangan Batch 2	30	PPATK, Badan POM RI, Bappebti, Bareskrim Polri, BNN RI, BP2MI Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejaksaan Agung, KKP, Otoritas Jasa Keuangan	34	BNN, BNNP, BPOM, Kejaksaan Agung, Diskrimsus POLDA, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Ditresnarkoba POLDA, PPATK, KKP, KLHK, DJP, DJBC
10	4 - 8 September	Penanganan TPPU Bagi Penyidik Batch IV (Bali)	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	63	BNN, DJP, KKP, KEJAKSAAN TINGGI, DJBC, POLDA, BAPPENAS, KEJAKSAAN NEGERI, BPOM, POLRESTA, DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI,

A

11	9 - 13 oktober	Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Batch I	35	Hakim MA	30	BP3MI Hakim MA
12	17 - 19 Oktober	Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional Batch 2	35	Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bappebti, Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, Direktorat Hukum dan Regulasi, Bappenas, Direktorat Intelijen Perpajakan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kementerian ATR/BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Pangkalan PSDKP Tual Ditjen PSDKP	32	Bareskrim Polri, Jampidmil Kejaksaan Agung, KPK, BNN, DJP, DJBC, KKP
13	23 - 27 Oktober	Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Batch II	35	Hakim MA	28	Hakim MA
14	24 - 27 Oktober	Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyidik TPPU terkait TP Kehutanan	35	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejagung RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	36	Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	14 - 17 November	Penanganan TPPU Terkait dari TPPO	20	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DJBC, Kejagung RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	26	BP2MI, Kejaksaan Agung (Jampidum), Kejati DKI, Kejati Jabar, KPPPA, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Utara, Polres Kabupaten Bogor, Polres Kota Bekasi, Polres Kota Bogor, Polres Kota Depok, Polres Tangerang, Polres Tangsel, PPATK, Reskrim Polda Jabar, Reskrim Polda Metro Jaya
		Total Peserta	460	Total Peserta	534	Total Peserta

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana

A

Audited

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN BA 078

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telepon +6221-3850455 +6221-3853922

Faksimili +6221-3856809 +6221-3856826

Website : www.ppatk.go.id

A
Neraca Percobaan Tingkat Kementerian/Lembaga
Per 31 Desember 2023

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	295,324,440,555
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,691,517,303	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	930,098,969
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	58,397,998
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	21,517,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	72,000,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	288,800,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	5,360,020
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	6,479,455
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	266,048,456
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	42,815,405
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	16,434,017,045	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	245,090	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,991
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,002,186,330	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	272,271,814	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	942,990,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,663,758,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	3,780,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	94,721,425	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	898,080,420	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,639,880,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	8,870,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	270,945,000	0
3.0	511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1,200,268,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	283,380,400	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	869,161,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,536	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	59,532,680	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	14,655,614	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	136,805,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	55,111,620	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	198,360,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	6,125,580,322	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	488,880,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	14,002,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	107,950,626,590	0
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan	0	2,443,838

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,922,528,643	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	2,416,500
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,348,531,313	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	182,789,706	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	42,720,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	521,012,919	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	57,700
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	48,270
3.0	521211	Belanja Bahan	3,145,891,943	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,178,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,418,754,919	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	22,810,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,992,716,238	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	487,537,631	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	4,987,068,954	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	158,270,062	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,678,200	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,387,290,816	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	2,843,359,915	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,221,128,023	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,683,795,340	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,193,741,268	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,015,272,191	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	437,373,311	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,408,251,539	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	4,423,800
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4,837,221,160	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	21,260,893
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,812,917,134	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	502,670,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	150,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,357,604,285	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	300,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,137,429,838	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	3,706,992
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	81,184,473	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar	0	180
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	4,788,389,695	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,373,735,157	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	120,000,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,372,995,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	66,993,520	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,750,383,840	0
JUMLAH			297,086,228,022	297,086,228,022

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	4,494,720,138	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	11,886,118	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,765,713	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	28,765,713
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,120,416,879	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	82,445,284	0
0.0	117114	Suku Cadang	118,281,613	0
0.0	117131	Bahan Baku	6,485,460	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	176,329,079	0
0.0	131111	Tanah	235,898,373,342	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	231,682,791,394	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	231,903,803,902	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	149,962,000	0
0.0	134113	Jaringan	85,640,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	720,400,368	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,017,550	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	172,405,473,882
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	31,884,473,343
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	121,844,125
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	18,555,329
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	56,528,750
0.0	162151	Software	28,238,445,140	0
0.0	162161	Lisensi	16,570,899,520	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	48,015,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	900,470,326	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	5,088,200,711	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	5,088,200,711
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	25,322,926,815
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	1,562,254,838
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	7,462,820
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	723,263,159
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	899,531,266
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	8,965,417
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	295,324,440,555
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,691,517,303	0
0.0	391111	Ekuitas	0	490,854,198,651
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	516,957,999	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	114,885,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391119	Koreksi Lainnya	36,227,626	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	5,997,600,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	930,098,969
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	58,397,998
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	20,873,666
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	72,000,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	288,800,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	5,360,020
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,353,205
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	266,048,456
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang	0	42,815,405
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	4,073,160
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	16,433,700,545	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	243,069	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,002,154,680	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	272,261,070	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	942,990,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,662,218,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	94,721,425	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	898,080,420	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,639,880,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	262,075,000	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	1,200,268,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	283,380,400	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	869,161,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	14,536	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	59,532,680	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	14,655,614	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	136,805,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	55,111,620	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	198,360,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	6,125,580,322	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	488,880,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	14,002,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	107,950,626,590	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,920,084,805	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,346,114,813	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	182,789,706	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	42,720,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	520,955,219	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,145,843,673	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,178,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,395,944,919	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	5,298,806,099	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	159,928,724	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,061,200	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,306,523,520	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	2,840,959,915	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,222,990,660	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,684,545,340	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,193,741,268	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,015,272,191	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	437,373,311	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,862,810,667	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	4,035,121,960	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9,791,656,241	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	501,770,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,357,304,285	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,133,722,846	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	81,184,473	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	4,779,777,147	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28,633,673,391	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,304,440,664	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18,745,250	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,854,666	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9,707,500	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	4,121,308,888	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	1,553,631,828	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,818,663,229	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	192,114,239	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	87,336,769	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	14,661,634	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	261,488,586	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	273,392,000	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	1,874,626,873	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	4,017,518	0

JUMLAH	1,032,000,306,253	1,032,000,306,253
--------	-------------------	-------------------

Keterangan :
FINAL

B
Neraca Tingkat Kementerian/Lembaga
Per 31 Desember 2023 dan 2022

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak 08/05/24 3:05 PM

Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4,494,720,138	6,493,196,989	(1,998,476,851)	(30.78)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	11,886,118	0	11,886,118	0.00
Piutang Bukan Pajak	28,765,713	439,903,328	(411,137,615)	(93.46)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(28,765,713)	(403,675,702)	374,909,989	(92.87)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	36,227,626	(36,227,626)	(100.00)
Persediaan	1,503,958,315	1,402,925,481	101,032,834	7.20
JUMLAH ASET LANCAR	6,010,564,571	7,932,350,096	(1,921,785,525)	(24.23)
ASET TETAP				
Tanah	235,898,373,342	235,129,908,040	768,465,302	0.33
Peralatan dan Mesin	231,682,791,394	189,764,324,578	41,918,466,816	22.09
Gedung dan Bangunan	231,903,803,902	227,693,849,784	4,209,954,118	1.85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	235,602,000	235,602,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	720,400,368	508,155,368	212,245,000	41.77
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,017,550	99,017,550	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(204,486,875,429)	(176,983,269,960)	(27,503,605,469)	15.54
JUMLAH ASET TETAP	496,053,113,127	476,447,587,360	19,605,525,767	4.11
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	44,857,359,660	37,963,344,052	6,894,015,608	18.16
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	900,470,326	0	900,470,326	0.00
Aset Lain-lain	5,088,200,711	5,679,017,251	(590,816,540)	(10.40)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(31,973,382,364)	(36,746,446,907)	4,773,064,543	(12.99)
JUMLAH ASET LAINNYA	18,872,648,333	6,895,914,396	11,976,733,937	173.68
JUMLAH ASET	520,936,326,031	491,275,851,852	29,660,474,179	6.04
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,630,257,245	413,331,118	1,216,926,127	294.42
Pendapatan Diterima Dimuka	8,965,417	8,322,083	643,334	7.73
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,639,222,662	421,653,201	1,217,569,461	288.76
JUMLAH KEWAJIBAN	1,639,222,662	421,653,201	1,217,569,461	288.76
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	519,297,103,369	490,854,198,651	28,442,904,718	5.79
JUMLAH EKUITAS	519,297,103,369	490,854,198,651	28,442,904,718	5.79
JUMLAH EKUITAS	519,297,103,369	490,854,198,651	28,442,904,718	5.79
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	520,936,326,031	491,275,851,852	29,660,474,179	6.04

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data	08/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak	08/05/24 3:05 PM
Halaman	2
	lap_neraca_kl_komparatif

Keterangan :
FINAL

C

Laporan Operasional Tingkat Kementerian/Lembaga
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM

Halaman : 1

lap_lo_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	389,026,871	234,845,803	154,181,068	65.652
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	389,026,871	234,845,803	154,181,068	65.652
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	389,026,871	234,845,803	154,181,068	65.652
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	146,524,787,576	133,079,269,941	13,445,517,635	10.103
Beban Persediaan	3,094,813,449	2,380,143,014	714,670,435	30.026
Beban Barang dan Jasa	35,797,317,056	40,316,651,844	(4,519,334,788)	(11.21)
Beban Pemeliharaan	23,630,029,137	23,440,250,924	189,778,213	0.81
Beban Perjalanan Dinas	22,645,414,992	12,984,131,783	9,661,283,209	74.408
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM

Halaman : 2

lap_lo_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	38,644,362,187	31,678,404,427	6,965,957,760	21.99
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	403,675,702	(403,675,702)	(100)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	270,336,724,397	244,282,527,635	26,054,196,762	10.666
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(269,947,697,526)	(244,047,681,832)	(25,900,015,694)	10.613
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(886,129,906)	836,159,970	(1,722,289,876)	(205.97 6)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	988,496,967	846,394,370	142,102,597	16.789
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,874,626,873	10,234,400	1,864,392,473	18,216. 92
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	314,279,523	488,162,214	(173,882,691)	(35.62)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	318,297,041	568,909,265	(250,612,224)	(44.051)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,017,518	80,747,051	(76,729,533)	(95.025)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(571,850,383)	1,324,322,184	(1,896,172,567)	(143.18 1)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(270,519,547,909)	(242,723,359,648)	(27,796,188,261)	11.452
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(270,519,547,909)	(242,723,359,648)	(27,796,188,261)	11.452

Keterangan :

FINAL

D
Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian/Lembaga
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl Data : 08/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:58 PM

Halaman : 1

lap_lpe_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	490,854,198,651	507,788,325,127	(16,934,126,476)	(3.335)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(270,519,547,909)	(242,723,359,648)	(27,796,188,261)	11.452
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(668,070,625)	(83,729,364)	(584,341,261)	697.893
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(631,842,999)	(85,760,304)	(546,082,695)	636.755
LAIN-LAIN	(36,227,626)	2,030,940	(38,258,566)	(1,883.786)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	299,630,523,252	225,872,962,536	73,757,560,716	32.654
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	28,442,904,718	(16,934,126,476)	45,377,031,194	(267.962)
EKUITAS AKHIR	519,297,103,369	490,854,198,651	28,442,904,718	5.795

Keterangan :

FINAL

E
Laporan Realisasi Anggaran Tingkat
Kementerian/Lembaga untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 078

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:59 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_kl_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	1,691,517,303	1,691,517,303	0	12,000,000	1,218,748,310	1,206,748,310	10,156
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,691,517,303	1,691,517,303	0	12,000,000	1,218,748,310	1,206,748,310	10,156
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	1,691,517,303	1,691,517,303	0	12,000,000	1,218,748,310	1,206,748,310	10,156
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	295,106,419,000	295,324,440,555	218,021,555	100	215,618,760,000	213,502,849,440	(2,115,910,560)	99
1. Belanja Pegawai	146,125,064,000	146,522,906,500	397,842,500	100	133,500,242,000	133,080,013,207	(420,228,793)	100
2. Belanja Barang	99,290,090,000	99,117,426,538	(172,663,462)	100	65,345,364,000	63,756,378,703	(1,588,985,297)	98
3. Belanja Modal	49,691,265,000	49,684,107,517	(7,157,483)	100	16,773,154,000	16,666,457,530	(106,696,470)	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 078

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 2:59 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	295,106,419,000	295,324,440,555	218,021,555	100	215,618,760,000	213,502,849,440	(2,115,910,560)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

F

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat
Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja Untuk Periode
yang Berakhir 31 Desember 2023

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 08/05/24 2:59 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	14,424,162,000	15,945,198,000	16,434,017,045	0	16,434,017,045	103.07	(488,819,045)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	342,000	255,000	245,090	1,991	243,099	96.11	11,901
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	878,576,000	1,002,213,000	1,002,186,330	0	1,002,186,330	100	26,670
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	240,524,000	272,283,000	272,271,814	0	272,271,814	100	11,186
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	841,716,000	942,990,000	942,990,000	0	942,990,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,207,088,000	2,664,067,000	2,663,758,000	3,780,000	2,659,978,000	99.99	4,089,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	30,089,000	94,723,000	94,721,425	0	94,721,425	100	1,575
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	747,253,000	898,265,000	898,080,420	0	898,080,420	99.98	184,580
511129	Belanja Uang Makan PNS	5,607,924,000	2,657,287,000	2,639,880,000	0	2,639,880,000	99.34	17,407,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	230,548,000	270,945,000	270,945,000	8,870,000	262,075,000	100	8,870,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	25,208,222,000	24,748,226,000	25,219,095,124	12,651,991	25,206,443,133	101.9	(458,217,133)
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	1,201,960,000	1,200,268,000	1,200,268,000	0	1,200,268,000	100	0
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	359,268,000	283,382,000	283,380,400	0	283,380,400	100	1,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,561,228,000	1,483,650,000	1,483,648,400	0	1,483,648,400	100	1,600
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	869,164,000	869,161,800	0	869,161,800	100	2,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	18,000	14,536	0	14,536	80.76	3,464
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	59,535,000	59,532,680	0	59,532,680	100	2,320
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	14,658,000	14,655,614	0	14,655,614	99.98	2,386
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	136,805,000	136,805,000	0	136,805,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	55,112,000	55,111,620	0	55,111,620	100	380
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	203,348,000	198,360,000	0	198,360,000	97.55	4,988,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	1,338,640,000	1,333,641,250	0	1,333,641,250	99.63	4,998,750
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	6,003,281,000	6,125,601,000	6,125,580,322	0	6,125,580,322	100	20,678
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	6,003,281,000	6,125,601,000	6,125,580,322	0	6,125,580,322	100	20,678
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	604,162,000	534,797,000	488,880,000	0	488,880,000	91.41	45,917,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	20,483,000	14,002,000	0	14,002,000	68.36	6,481,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	604,162,000	555,280,000	502,882,000	0	502,882,000	90.56	52,398,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	101,627,811,000	107,950,783,000	107,950,626,590	0	107,950,626,590	100	156,410

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 08/05/24 2:59 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	3,922,884,000	3,922,528,643	2,443,838	3,920,084,805	99.99	2,799,195
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	101,627,811,000	111,873,667,000	111,873,155,233	2,443,838	111,870,711,395	100	2,955,605
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	135,004,704,000	146,125,064,000	146,538,002,329	15,095,829	146,522,906,500	100.28	(397,842,500)
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,222,826,000	9,365,196,000	9,348,531,313	2,416,500	9,346,114,813	99.82	19,081,187
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	156,000,000	182,912,000	182,789,706	0	182,789,706	99.93	122,294
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	32,640,000	42,720,000	42,720,000	0	42,720,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	550,359,000	528,461,000	521,012,919	57,700	520,955,219	98.59	7,505,781
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	9,961,825,000	10,119,289,000	10,095,053,938	2,474,200	10,092,579,738	99.76	26,709,262
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,868,925,000	3,170,926,000	3,145,891,943	48,270	3,145,843,673	99.21	25,082,327
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	663,300,000	1,178,200,000	1,178,000,000	0	1,178,000,000	99.98	200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,314,512,000	3,419,653,000	3,418,754,919	22,810,000	3,395,944,919	99.97	23,708,081
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,846,737,000	7,768,779,000	7,742,646,862	22,858,270	7,719,788,592	99.66	48,990,408
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,136,191,000	2,994,892,000	2,992,716,238	0	2,992,716,238	99.93	2,175,762
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	473,640,000	487,666,000	487,537,631	0	487,537,631	99.97	128,369
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,609,831,000	3,482,558,000	3,480,253,869	0	3,480,253,869	99.93	2,304,131
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	5,400,000,000	4,987,080,000	4,987,068,954	0	4,987,068,954	100	11,046
522112	Belanja Langganan Telepon	192,000,000	158,723,000	158,270,062	0	158,270,062	99.71	452,938
522113	Belanja Langganan Air	6,000,000	1,679,000	1,678,200	0	1,678,200	99.95	800
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,223,978,000	2,389,926,000	2,387,290,816	0	2,387,290,816	99.89	2,635,184
522131	Belanja Jasa Konsultan	4,090,070,000	2,843,371,000	2,843,359,915	0	2,843,359,915	100	11,085
522141	Belanja Sewa	2,121,701,000	3,221,463,000	3,221,128,023	0	3,221,128,023	99.99	334,977
522151	Belanja Jasa Profesi	2,040,080,000	1,687,250,000	1,683,795,340	0	1,683,795,340	99.8	3,454,660
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,400,585,000	2,193,796,000	2,193,741,268	0	2,193,741,268	100	54,732
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	18,474,414,000	17,483,288,000	17,476,332,578	0	17,476,332,578	99.96	6,955,422
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,650,611,000	2,019,753,000	2,015,272,191	0	2,015,272,191	99.78	4,480,809
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	456,000,000	437,382,000	437,373,311	0	437,373,311	100	8,689
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,997,170,000	30,419,330,000	30,408,251,539	4,423,800	30,403,827,739	99.96	15,502,261
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	16,704,000,000	4,837,300,000	4,837,221,160	0	4,837,221,160	100	78,840

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 08/05/24 2:59 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	41,807,781,000	37,713,765,000	37,698,118,201	4,423,800	37,693,694,401	99.96	20,070,599
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,023,668,000	9,851,725,000	9,812,917,134	21,260,893	9,791,656,241	99.61	60,068,759
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,060,000,000	504,160,000	502,670,000	150,000	502,520,000	99.7	1,640,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,788,604,000	2,357,926,000	2,357,604,285	300,000	2,357,304,285	99.99	621,715
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,633,214,000	5,139,018,000	5,137,429,838	3,706,992	5,133,722,846	99.97	5,295,154
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	21,505,486,000	17,852,829,000	17,810,621,257	25,417,885	17,785,203,372	99.76	67,625,628
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	355,324,000	81,186,000	81,184,473	0	81,184,473	100	1,527
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	2,820,016,000	4,788,396,000	4,788,389,695	180	4,788,389,515	100	6,485
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3,175,340,000	4,869,582,000	4,869,574,168	180	4,869,573,988	100	8,012
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	104,381,414,000	99,290,090,000	99,172,600,873	55,174,335	99,117,426,538	99.88	172,663,462
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,737,610,000	46,375,780,000	46,373,735,157	0	46,373,735,157	100	2,044,843
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	43,737,610,000	46,495,780,000	46,493,735,157	0	46,493,735,157	100	2,044,843
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,365,000,000	1,378,000,000	1,372,995,000	0	1,372,995,000	99.64	5,005,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,873,537,000	67,000,000	66,993,520	0	66,993,520	99.99	6,480
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	8,238,537,000	1,445,000,000	1,439,988,520	0	1,439,988,520	99.65	5,011,480
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	654,397,000	1,750,485,000	1,750,383,840	0	1,750,383,840	99.99	101,160
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	654,397,000	1,750,485,000	1,750,383,840	0	1,750,383,840	99.99	101,160
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	52,630,544,000	49,691,265,000	49,684,107,517	0	49,684,107,517	99.99	7,157,483
	JUMLAH BELANJA	292,016,662,000	295,106,419,000	295,394,710,719	70,270,164	295,324,440,555	100.1	(218,021,555)

G
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat
Kementerian/Lembaga Menurut Sumber Dana/Program/
Kegiatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 08/05/24 2:59 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme							
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	4,033,899,000	3,621,906,000	3,616,857,234	7,000	3,616,850,234	99.86	5,055,766
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK	2,257,211,000	1,732,476,000	1,731,694,671	405,000	1,731,289,671	99.93	1,186,329
3380	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	9,759,639,000	10,680,509,000	10,657,205,386	7,605,368	10,649,600,018	99.71	30,908,982
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	70,000,000,000	66,284,883,000	66,282,703,232	990,000	66,281,713,232	100	3,169,768
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	7,842,319,000	6,495,091,000	6,493,672,072	0	6,493,672,072	99.98	1,418,928
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	4,916,278,000	4,443,939,000	4,442,954,831	6,643,854	4,436,310,977	99.83	7,628,023
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BE	98,809,346,000	93,258,804,000	93,225,087,426	15,651,222	93,209,436,204	99.964	49,367,796
WA	Program Dukungan Manajemen							
3374	Pengawasan Internal PPATK	300,000,000	280,387,000	280,376,731	0	280,376,731	100	10,269
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	135,383,704,000	146,387,930,000	146,797,746,812	15,095,829	146,782,650,983	199.96	-394,720,983
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Ppatk	8,171,681,000	7,898,839,000	7,878,640,206	32,078,213	7,846,561,993	195.49	52,277,007
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK	49,351,931,000	47,280,459,000	47,212,859,544	7,444,900	47,205,414,644	199.61	75,044,356
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	193,207,316,000	201,847,615,000	202,169,623,293	54,618,942	202,115,004,351	100.16	-267,389,351
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	292,016,662,000	295,106,419,000	295,394,710,719	70,270,164	295,324,440,555	100.098	-218,021,555
	JUMLAH	292,016,662,000	295,106,419,000	295,394,710,719	70,270,164	295,324,440,555	100.1	-218,021,555

H

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat
Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 078

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 08/05/24 2:59 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	930,098,969	0	930,098,969	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	58,397,998	0	58,397,998	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	21,517,000	0	21,517,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	72,000,000	0	72,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,082,013,967	0	1,082,013,967	0
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	288,800,000	0	288,800,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	0	288,800,000	0	288,800,000	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	5,360,020	0	5,360,020	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	5,360,020	0	5,360,020	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	6,479,455	0	6,479,455	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	6,479,455	0	6,479,455	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	266,048,456	0	266,048,456	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,815,405	0	42,815,405	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	308,863,861	0	308,863,861	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	1,691,517,303	0	1,691,517,303	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,691,517,303	0	1,691,517,303	

I

Daftar Rekening Pemerintah

DAFTAR REKENING PEMERINTAH

No.	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian Negara/Lembaga	kode BA - Es. I - Satker	Jenis Rekening (Giro/Deposito)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-453374 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Giro	1190000909018 (Rek Induk)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gambir
2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-453374 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Giro	8100124533741000	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Bank Mandiri, KC. Jkt Plaza Mandiri
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-417654- Pusdiklat APUPPT	Giro	1330026731364 (Rek Induk)	BPN 023 PUSDIKLAT APU DAN PP TERORIS	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	Bank Mandiri, KCP. Mayor Oking
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-417654- Pusdiklat APUPPT	Giro	8100124176541000	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	Bank Mandiri, KC. Jkt Plaza Mandiri

J
Kas di Bendahara Pengeluaran,
Kas Lainnya, dan Setara Kas

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Akun	31 Desember 2023		Keterangan	31 Desember 2022		Keterangan
			Jumlah	Tunai/No Rek		Jumlah	Tunai/No Rek	
1	-	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	-	-	-	-	-
2	-	Pusat Pendidikan dan Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Nama Akun	31 Desember 2023		Keterangan	31 Desember 2022		Keterangan
			Jumlah	Tunai/No Rek		Jumlah	Tunai/No Rek	
1	453374	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	-	-	-	-	-
2	417654	Pusat Pendidikan dan Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-



K
**Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**



IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (KOMITE TPPU)
TAHUN 2023 *Audited*

Dasar Hukum

1. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite TPPU.

Tugas Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, Komite TPPU bertugas untuk mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Fungsi Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
4. Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Keanggotaan Komite TPPU

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2016, susunan Keanggotaan Komite TPPU, yaitu :

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ikhtisar Laporan Keuangan

Sekretaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Intelijen Negara;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
13. Kepala Badan Narkotika Nasional.

Informasi Keuangan

Kegiatan Komite TPPU dibebankan pada DIPA PPAK Nomor DIPA-078.01.1.453374/2023 tanggal 30 November 2022 dalam Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia – Pelaksanaan Kegiatan Strategi Nasional (3380.AEC.002.052)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
DANA APBN/NON APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NO	NAMA UBL	ALOKASI APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA 9 = (3-8)	NON APBN	BA	KETERANGAN
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
1	Komite PP TPPU	995.684.000	-	995.610.277	-	-	995.610.277	73.723	-	078	Kode Kegiatan/ Output : 3380.AEC.002. 052

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NO	NAMA UBL	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN 5 = (3+4)	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN 8 = (6+7)	SURPLUS (DEFISIT) 9 = (5-9)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6+7)	9 = (5-9)	11	11
1	Komite PP TPPU	-	-	-	995.610.277	-	995.610.277	(995.610.277)	078	

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023**

NO	NAMA UBL	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)	8	9	10 = (8+9)	11	12 = (10+11)	11	11
1	Komite PP TPPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078	

Jakarta, 2 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



M. Taufik Kurniawan
NIP. 196804121988021001

L
Catatan Ringkas atas Barang Milik Negara

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tgl.Data : 18/05/24 6:00 PM

Tanggal : 18/05/24 8:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	1,120,416,879
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	82,445,284
117114	Suku Cadang	118,281,613
117131	Bahan Baku	6,485,460
117199	Persediaan Lainnya	176,329,079
131111	Tanah	235,898,373,342
132111	Peralatan dan Mesin	231,682,791,394
133111	Gedung dan Bangunan	231,903,803,902
134111	Jalan dan Jembatan	149,962,000
134113	Jaringan	85,640,000
135121	Aset Tetap Lainnya	720,400,368
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,017,550
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(172,405,473,882)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(31,884,473,343)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(121,844,125)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(18,555,329)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(56,528,750)
162151	Software	28,238,445,140
162161	Lisensi	16,570,899,520
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	48,015,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5,088,200,711
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(5,088,200,711)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(25,322,926,815)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(1,562,254,838)
J U M L A H		515,529,249,449

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 20/05/24 10:57 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	20,547	235,129,908,040	131	768,465,302	0	0	20,678	235,898,373,342
20101	TANAH PERSIL	20,547	235,129,908,040	131	768,465,302	0	0	20,678	235,898,373,342
132111	Peralatan dan Mesin	9,947	190,137,799,578	1,140	76,944,680,694	1,175	34,759,879,378	9,912	232,322,600,894
30103	ALAT BANTU	64	12,298,027,116	4	480,373,700	3	55,854,690	65	12,722,546,126
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	52	14,370,621,704	1	6,871,000	10	1,385,916,900	43	12,991,575,804
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	55	122,575,831	8	20,973,696	0	0	63	143,549,527
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	7	21,713,500	2	2,839,600	0	0	9	24,553,100
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	38	122,156,100	2	8,251,000	5	5,919,980	35	124,487,120
30303	ALAT UKUR	6	15,734,400	1	1,962,800	0	0	7	17,697,200
30401	ALAT PENGOLAHAN	24	68,475,000	0	0	0	0	24	68,475,000
30501	ALAT KANTOR	1,774	11,996,491,924	104	1,476,389,115	377	1,899,732,664	1,501	11,573,148,375
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,958	34,161,237,339	744	7,696,750,342	686	2,638,524,766	5,016	39,219,462,915
30601	ALAT STUDIO	222	4,565,859,449	13	4,760,630,000	17	2,531,832,250	218	6,794,657,199
30602	ALAT KOMUNIKASI	498	2,397,202,732	18	58,377,900	5	64,956,270	511	2,390,624,362
30603	PERALATAN PEMANCAR	6	908,173,045	0	0	0	0	6	908,173,045
30701	ALAT KEDOKTERAN	104	1,074,408,024	8	24,125,000	10	105,520,217	102	993,012,807
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	5,494,500	0	0	0	0	1	5,494,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	23	57,676,825	2	32,036,200	8	9,560,000	17	80,153,025
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	55,537,720	0	0	0	0	1	55,537,720
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	10	1,152,414,725	2	6,573,400	0	0	12	1,158,988,125
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	3,139,950	0	0	0	0	1	3,139,950
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	8	36,846,400	0	0	0	0	8	36,846,400
31001	KOMPUTER UNIT	917	15,935,128,789	180	3,942,599,625	15	157,575,000	1,082	19,720,153,414
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,074	88,980,645,391	48	58,383,043,678	19	25,577,812,281	1,103	121,785,876,788
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	8,030,000	0	0	0	0	2	8,030,000
31502	ALAT PELINDUNG	1	13,084,000	0	0	0	0	1	13,084,000
31503	ALAT SAR	5	105,874,260	0	0	0	0	5	105,874,260
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	221,986,700	0	0	0	0	7	221,986,700
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	67	1,139,442,454	1	2,923,638	17	254,261,860	51	888,104,232
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	22	299,821,700	2	39,960,000	3	72,412,500	21	267,369,200
133111	Gedung dan Bangunan	11	227,693,849,784	1	5,988,197,920	2	1,778,243,802	10	231,903,803,902
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9	199,388,461,230	1	5,988,197,920	2	1,778,243,802	8	203,598,415,348
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	27,982,974,484	0	0	0	0	1	27,982,974,484
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	322,414,070	0	0	0	0	1	322,414,070

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 20/05/24 10:57 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	1	149,962,000	0	0	0	0	1	149,962,000
50101	JALAN	1	149,962,000	0	0	0	0	1	149,962,000
134113	Jaringan	2	85,640,000	0	0	0	0	2	85,640,000
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	85,640,000	0	0	0	0	2	85,640,000
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	341	508,155,368	222	248,206,000	84	35,961,000	479	720,400,368
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	324	439,044,368	182	73,406,000	84	35,961,000	422	476,489,368
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	7	7,728,500	40	174,800,000	0	0	47	182,528,500
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	61,382,500	0	0	0	0	10	61,382,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	25	5,679,264,751	1,150	6,473,302,941	1,157	7,064,119,481	18	5,088,448,211
30103	ALAT BANTU	0	0	3	55,854,690	3	55,854,690	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	10	1,385,916,900	10	1,385,916,900	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	5	5,919,980	5	5,919,980	0	0
30501	ALAT KANTOR	6	331,072,500	364	1,251,277,014	364	1,251,277,014	6	331,072,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4	367,717,746	677	2,600,190,099	678	2,600,960,099	3	366,947,746
30601	ALAT STUDIO	0	0	14	27,310,250	14	27,310,250	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	5	64,956,270	5	64,956,270	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	10	105,520,217	10	105,520,217	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	8	8,360,000	8	8,360,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	2	39,231,100	15	157,575,000	17	196,806,100	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	11	4,399,557,965	17	111,812,661	19	120,942,661	9	4,390,427,965
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	17	254,261,860	17	254,261,860	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	3	72,412,500	3	72,412,500	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	541,685,440	2	371,935,500	4	913,620,940	0	0
TOTAL			659,384,579,521		90,422,852,857		43,638,203,661		706,169,228,717

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM
Tanggal : 20/05/24 10:57 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_kl

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	336	36,956,013,988	3	1,832,938,840	97	10,550,507,688	242	28,238,445,140
80101	ASET TAK BERWUJUD	336	36,956,013,988	3	1,832,938,840	97	10,550,507,688	242	28,238,445,140
162161	Lisensi	2	81,208,600	14	16,539,190,920	1	49,500,000	15	16,570,899,520
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	81,208,600	14	16,539,190,920	1	49,500,000	15	16,570,899,520
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	926,121,464	0	0	2	878,106,464	1	48,015,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	3	926,121,464	0	0	2	878,106,464	1	48,015,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	99	11,363,229,152	99	11,363,229,152	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	99	11,363,229,152	99	11,363,229,152	0	0
TOTAL			37,963,344,052		29,735,358,912		22,841,343,304		44,857,359,660

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tanggal : 20/05/24 10:58 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	20,547	235,129,908,040	131	768,465,302	0	0	20,678	235,898,373,342
20101	TANAH PERSIL	20,547	235,129,908,040	131	768,465,302	0	0	20,678	235,898,373,342
132111	Peralatan dan Mesin	9,247	189,764,324,578	688	76,671,288,694	1,121	34,752,821,878	8,814	231,682,791,394
30103	ALAT BANTU	64	12,298,027,116	4	480,373,700	3	55,854,690	65	12,722,546,126
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	52	14,370,621,704	1	6,871,000	10	1,385,916,900	43	12,991,575,804
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	55	122,575,831	8	20,973,696	0	0	63	143,549,527
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	7	21,713,500	2	2,839,600	0	0	9	24,553,100
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	36	121,826,100	2	8,251,000	5	5,919,980	33	124,157,120
30303	ALAT UKUR	6	15,734,400	1	1,962,800	0	0	7	17,697,200
30401	ALAT PENGOLAHAN	24	68,475,000	0	0	0	0	24	68,475,000
30501	ALAT KANTOR	1,705	11,983,099,074	84	1,471,089,115	334	1,895,403,164	1,455	11,558,785,025
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,592	33,893,905,989	312	7,428,658,342	684	2,637,974,766	4,220	38,684,589,565
30601	ALAT STUDIO	202	4,561,371,449	13	4,760,630,000	8	2,529,654,250	207	6,792,347,199
30602	ALAT KOMUNIKASI	303	2,322,536,732	18	58,377,900	5	64,956,270	316	2,315,958,362
30603	PERALATAN PEMANCAR	6	908,173,045	0	0	0	0	6	908,173,045
30701	ALAT KEDOKTERAN	85	1,070,724,124	8	24,125,000	10	105,520,217	83	989,328,907
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	5,494,500	0	0	0	0	1	5,494,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	22	56,826,825	2	32,036,200	8	9,560,000	16	79,303,025
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	55,537,720	0	0	0	0	1	55,537,720
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	10	1,152,414,725	2	6,573,400	0	0	12	1,158,988,125
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	3,139,950	0	0	0	0	1	3,139,950
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	36,743,000	0	0	0	0	7	36,743,000
31001	KOMPUTER UNIT	917	15,935,128,789	180	3,942,599,625	15	157,575,000	1,082	19,720,153,414
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,047	88,972,015,891	48	58,383,043,678	19	25,577,812,281	1,076	121,777,247,288
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	8,030,000	0	0	0	0	2	8,030,000
31502	ALAT PELINDUNG	1	13,084,000	0	0	0	0	1	13,084,000
31503	ALAT SAR	5	105,874,260	0	0	0	0	5	105,874,260
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	221,986,700	0	0	0	0	7	221,986,700
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	67	1,139,442,454	1	2,923,638	17	254,261,860	51	888,104,232
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	22	299,821,700	2	39,960,000	3	72,412,500	21	267,369,200
133111	Gedung dan Bangunan	11	227,693,849,784	1	5,988,197,920	2	1,778,243,802	10	231,903,803,902
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	9	199,388,461,230	1	5,988,197,920	2	1,778,243,802	8	203,598,415,348
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	27,982,974,484	0	0	0	0	1	27,982,974,484
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	322,414,070	0	0	0	0	1	322,414,070

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM
Tanggal : 20/05/24 10:58 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	1	149,962,000	0	0	0	0	1	149,962,000
50101	JALAN	1	149,962,000	0	0	0	0	1	149,962,000
134113	Jaringan	2	85,640,000	0	0	0	0	2	85,640,000
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	85,640,000	0	0	0	0	2	85,640,000
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	341	508,155,368	222	248,206,000	84	35,961,000	479	720,400,368
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	324	439,044,368	182	73,406,000	84	35,961,000	422	476,489,368
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	7	7,728,500	40	174,800,000	0	0	47	182,528,500
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	61,382,500	0	0	0	0	10	61,382,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	24	5,679,017,251	1,096	6,466,245,441	1,103	7,057,061,981	17	5,088,200,711
30103	ALAT BANTU	0	0	3	55,854,690	3	55,854,690	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	10	1,385,916,900	10	1,385,916,900	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	5	5,919,980	5	5,919,980	0	0
30501	ALAT KANTOR	6	331,072,500	321	1,246,947,514	321	1,246,947,514	6	331,072,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	3	367,470,246	675	2,599,640,099	676	2,600,410,099	2	366,700,246
30601	ALAT STUDIO	0	0	5	25,132,250	5	25,132,250	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	5	64,956,270	5	64,956,270	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	10	105,520,217	10	105,520,217	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	8	8,360,000	8	8,360,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	2	39,231,100	15	157,575,000	17	196,806,100	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	11	4,399,557,965	17	111,812,661	19	120,942,661	9	4,390,427,965
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	17	254,261,860	17	254,261,860	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	3	72,412,500	3	72,412,500	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	541,685,440	2	371,935,500	4	913,620,940	0	0
TOTAL			659,010,857,021		90,142,403,357		43,624,088,661		705,529,171,717



PPATK

**JL. IR. H. JUANDA STREET NO.35, KB. KLP., KECAMATAN GAMBIR, KOTA
JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10120**